

AKSI BERSAMA

Membangun momentum dan kolaborasi
dalam pengelolaan perikanan tuna
berkelanjutan di Indonesia

JUNI 2024

TUNA 
CONSORTIUM

DAFTAR ISI

Tentang Laporan	1
Gambaran umum	2
Konsorsium Tuna Indonesia	5
TEMA 1. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMANFAATAN: MEMAJUKAN KERANGKA KERJA TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN	9
MEMAJUKAN STRATEGI PEMANFAATAN TUNA DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA	9
MEMPERKUAT BASIS DATA	13
TEMA 2: PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN: PENGELOLAAN BERSAMA YANG INKLUSIF DAN KETERLIBATAN RANTAI PASOKAN	17
KOORDINASI DAN KERJA SAMA: MENDUKUNG KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN	17
KETERLIBATAN SEKTOR PUKAT CINCIN	20
MEMPROMOSIKAN PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA YANG BERKELANJUTAN	21
MENUMBUHKAN INOVASI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA	23
TEMA 3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: MENINGKATKAN KAPASITAS, MANFAAT, DAN KETAHANAN NELAYAN	25
MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN MASYARAKAT	25
KAPASITAS NELAYAN UNTUK BEROPERASI DI LAUT	27
KAPASITAS NELAYAN DALAM PENANGANAN HASIL TANGKAPAN	28
KAPASITAS NELAYAN DALAM BERBISNES	29
TEMA 4: AKSI KOLEKTIF: MEMBANGUN KONSORSIUM TUNA YANG EFEKTIF	31
KEKUATAN KONSORSIUM	31

AKRONIM & SINGKATAN

APSI	Asosiasi Purse Seine Indonesia
BPPSDMKP	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
CODRS	<i>Crew-Operated Data Recording System</i>
CPIB	Cara Penanganan Ikan yang Baik
DJPT	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
ESM	Evaluasi Strategi Manajemen
ETP	<i>Endangered, Threatened and Protected (species)</i>
FAD	<i>Fish Aggregating Device</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FIP	<i>Fishery Improvement Project</i> , Proyek perbaikan perikanan
FTUSA	<i>FairTrade USA</i>
GT	<i>Gross tons</i> , tonnase kotor
HCR	<i>Harvest Control Rule</i> (Aturan pengendalian pemanfaatan)
IAW	<i>Indonesia Archipelagic Waters</i> , Perairan Kepulauan Indonesia
ICTBF	<i>International Coastal Tuna Business Forum</i>
IPNLF	<i>International Pole and Line Foundation</i>
ITC	<i>Indonesia Tuna Conference</i>
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KPBP	Komite Pengelola Bersama Perikanan
MDPI	Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia
MSC	<i>Marine Stewardship Council</i>
PIT	Pengangkapan Ikan Terukur
RFMO	<i>Regional Fisheries Management Organization</i> , Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional
RPP-TCT	Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol
SIPR	Surat Izin Penempatan Rumpon
STELINA	Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional
WCPFC	<i>Western and Central Pacific Fisheries Commission</i>
WPP	Wilayah Pengelolaan Perikanan
YII	Yayasan IPNLF Indonesia
YKAN	Yayasan Konservasi Alam Nusantara



TENTANG LAPORAN

Keberhasilan dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan pendekatan kolaboratif dalam mengembangkan strategi pemanfaatan (*Harvest Strategy*) sebagai alat pengelolaan perikanan untuk perikanan tuna tropis di Indonesia merupakan kisah yang menginspirasi. Laporan ini mengacu pada pengalaman Konsorsium Tuna Indonesia (Konsorsium) selama dua setengah tahun terakhir (Fase Dua) dan dokumentasi peran Konsorsium sebagai mitra strategis yang mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna Tropis di Perairan Kepulauan Indonesia (*Indonesia Archipelagic Waters, IAW*). Lebih lanjut, kami menyebut hal ini sebagai Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW.

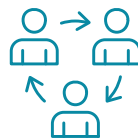
Laporan ini dimulai dengan gambaran umum tentang strategi pemanfaatan sebagai alat pengelolaan perikanan dalam konteks perikanan tuna Indonesia. Kemudian, akan dibahas secara mendalam mengenai empat bidang tematik yang menjadi fokus Konsorsium.

Kami berharap kisah-kisah yang terangkum dalam laporan ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pengelola perikanan, lembaga pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan perikanan lainnya, untuk menjaga momentum dan kerja sama melalui fase ketiga Konsorsium untuk seterusnya demi keberhasilan implementasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW, serta praktik-praktik pengelolaan berkelanjutan yang lebih luas.

BIDANG FOKUS TEMATIK



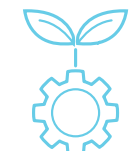
Pengembangan strategi pemanfaatan: memajukan tata kelola dan kerangka kerja kebijakan.



Keterlibatan pemangku kepentingan: pengelolaan bersama yang inklusif dan keterlibatan rantai pasokan.



Pemberdayaan masyarakat: meningkatkan kapasitas, manfaat, dan ketahanan nelayan.



Aksi kolektif: membangun Konsorsium Tuna yang efektif.



©FTUSA

GAMBARAN UMUM

TANTANGAN PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA DI INDONESIA

Indonesia memiliki perairan laut yang sangat luas, baik dari segi ukuran maupun nilai alaminya. Luas perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km² dan memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Perairan laut Indonesia juga merupakan daerah penangkapan ikan yang subur, baik untuk perikanan skala kecil dan skala besar yang terkenal dengan stok tuna komersialnya, terutama cakalang, tuna sirip kuning, dan tuna mata besar. Faktanya, Indonesia adalah produsen tuna terbesar di dunia, dengan tuna yang menyumbang lebih dari 10 persen produksi perikanan tangkap nasional dan 15–17 persen produksi tuna global setiap tahunnya¹. Pada tahun 2022, total tangkapan tuna mencapai 301.799 ton, dengan nilai lebih dari US\$ 680 juta².

Nilai biologis dan sosio-ekonomi yang tinggi dari perikanan tuna membutuhkan pendekatan pengelolaan yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutannya. Selama dekade terakhir, KKP telah melakukan upaya terus-menerus dalam mengembangkan instrumen untuk mengatur akses ke perikanan dan membatasi tangkapan. Kemungkinan pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan tindakan pengelolaan adaptif terhambat oleh kurangnya data berkala

(*time-series data*) untuk menginformasikan keputusan tentang perikanan, serta cakupan skala geografis yang sangat besar di perairan Indonesia dan karakteristik perikanan yang kompleks.

Sekitar 97 persen armada penangkapan ikan Indonesia terdiri dari nelayan berteknologi rendah dan berskala kecil yang mengoperasikan kapal di bawah sepuluh tonase kotor (GT)³ yang secara historis sebagian besar tidak diatur secara hukum. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pengumpulan data perikanan, terutama dari nelayan skala kecil di provinsi-provinsi terpencil di Indonesia bagian timur yang memiliki rantai pasok yang kompleks dengan banyak pemangku kepentingan dan lembaga atau badan yang masing-masing membutuhkan data yang berbeda mulai dari pendaratan hingga ekspor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah pengelolaan. Selain itu, berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan perikanan skala kecil selama pengembangan strategi pengelolaan yang tepat, sosialisasi keputusan pengelolaan secara efektif, dan penegakkan peraturan di komunitas nelayan yang jauh dari pusat administrasi memakan waktu yang signifikan dan sumber daya yang intensif.



Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia, menyoroti WPP di Perairan Kepulauan Indonesia (IAW) dan perikanan tangkap tuna..

KONTEKS GEOPOLITIK PERIKANAN TUNA DI IAW

Perairan laut Indonesia terbagi menjadi 11 unit geografis yang dikenal sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pembagian ini bertujuan untuk menyederhanakan pengelolaan perikanan dengan memecah kebutuhan yang kompleks dan beragam di seluruh nusantara menjadi wilayah yang lebih mudah dikelola. Setiap WPP memiliki dewan pengelolaan perikanan sendiri⁴ untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan perikanan yang merupakan pedoman dasar bagi semua pemangku kepentingan perikanan utama.

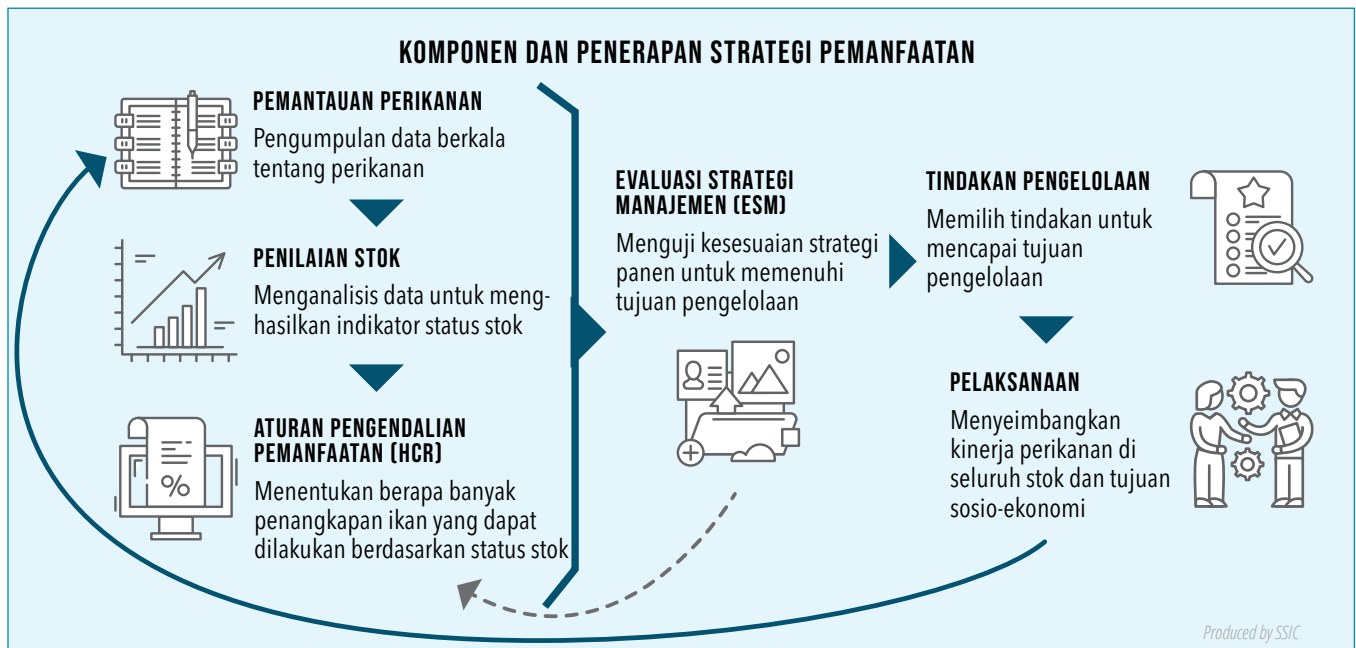
Namun, pengelolaan spesies yang bermigrasi seperti tuna harus mematuhi pengelolaan perikanan karena sering melintasi batas-batas WPP dan administratif, sehingga diperlukan pendekatan pengelolaan lintas wilayah yang terkoordinasi. Tuna juga melintasi perbatasan laut internasional, sehingga dibutuhkan pengelolaan terkoordinasi antar negara-negara yang berada di dalam jangkauan migrasi tuna.

Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organisation*, RFMO) berfungsi sebagai badan regional puncak untuk pengelolaan perikanan di laut lepas. Sebagai anggota aktif dari tiga RFMO lainnya⁵, Indonesia berkomitmen untuk mengatur dan mengelola perikanan tuna sesuai dengan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dari masing-masing RFMO, dan memastikan stok tuna lestari di seluruh rute migrasi Tuna. Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol (RPP-TCT)⁶ memandu pemerintah daerah di

seluruh Indonesia dalam mengatur perikanan tuna di bawah kewenangan mereka dan mengadopsi Tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan untuk stok dan perdagangan perikanan tuna yang berkelanjutan. RPP-TCT juga mengharuskan pembuatan dan pelaksanaan kerangka kerja strategi pemanfaatan untuk mengelola perikanan tuna di Perairan Kepulauan Indonesia (IAW). IAW membentang di tiga WPP yaitu WPP 713, 714, dan 715 (Gambar 1) dan menyumbang lebih dari separuh total produksi tuna dari perairan Indonesia yang berada di bawah yurisdiksi RFMO yang relevan, yaitu *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)⁷. Dengan begitu, Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna Tropis di IAW harus konsisten dengan tujuan pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan di tingkat internasional⁸, nasional, dan daerah.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN STRATEGI PEMANFAATAN (HARVEST STRATEGY)?

Strategi pemanfaatan semakin populer sebagai alat pengelolaan perikanan secara global dan diakui sebagai praktik terbaik untuk pengambilan keputusan perikanan berbasis bukti. Berbeda dengan pengelolaan perikanan tradisional yang bersifat dari atas ke bawah, strategi pemanfaatan yang komprehensif dikembangkan melalui proses konsultatif melibatkan para pemangku kepentingan utama dari pihak berwenang, ilmuwan, industri, dan sektor konservasi. Proses pengembangan kolaboratif ini meningkatkan dukungan pemangku kepentingan terhadap kontrol perikanan dan meniadakan interpretasi subjektif dari strategi



Gambar 2. Komponen strategi pemanfaatan dan bagaimana penerapannya dalam pengelolaan perikanan.

pemanfaatan oleh pemangku kepentingan yang berbeda.

Strategi pemanfaatan adalah pendekatan pengelolaan perikanan holistik dan menguraikan pemantauan, penilaian, dan pengelolaan sumber daya perikanan dengan menetapkan batas panen untuk spesies yang ditangkap dan menerapkan tindakan pengelolaan untuk mencapai tujuan pengelolaan spesifik. Dimana pengelola memiliki kapasitas teknis dan sumber daya ekonomi, strategi pemanfaatan yang sesuai dapat dimodelkan melalui metode 'Evaluasi Strategi Manajemen' (ESM). ESM mengevaluasi kesesuaian strategi potensial dengan menguji kinerja di bawah kondisi yang berbeda dan ketahanannya dalam menghadapi fluktuasi ekologi dan sosial sebelum penerapan strategi atau sebagai respon terhadap data pemantauan dan kondisi dunia nyata.

Strategi pemanfaatan disesuaikan dengan status perikanan. Data pemantauan sumber daya tertentu dikumpulkan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perikanan yang dibandingkan dengan tujuan dan referensi pengelolaan yang telah ditetapkan sebelumnya⁹. Hal ini memicu modifikasi pada tindakan-tindakan pengelolaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan strategi. Mekanisme yang menentukan respon terhadap status perikanan disebut aturan pengendalian pemanfaatan (*Harvest Control Rule*, HCR). Sistem adaptif ini melindungi stok ikan dengan menghindari atau memperbaiki penangkapan ikan yang berlebihan, yang mampu meningkatkan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan dan hasil sosial-ekonomi bagi para nelayan serta pemangku kepentingan industri. Strategi pemanfaatan juga merupakan

“**Strategi pemanfaatan perikanan adalah kerangka kerja komprehensif yang menetapkan tindakan pengelolaan yang diperlukan bagi perikanan untuk mencapai tujuan biologi, ekologi, dan sosio-ekonomi yang telah ditetapkan.**

— KKP, 2023

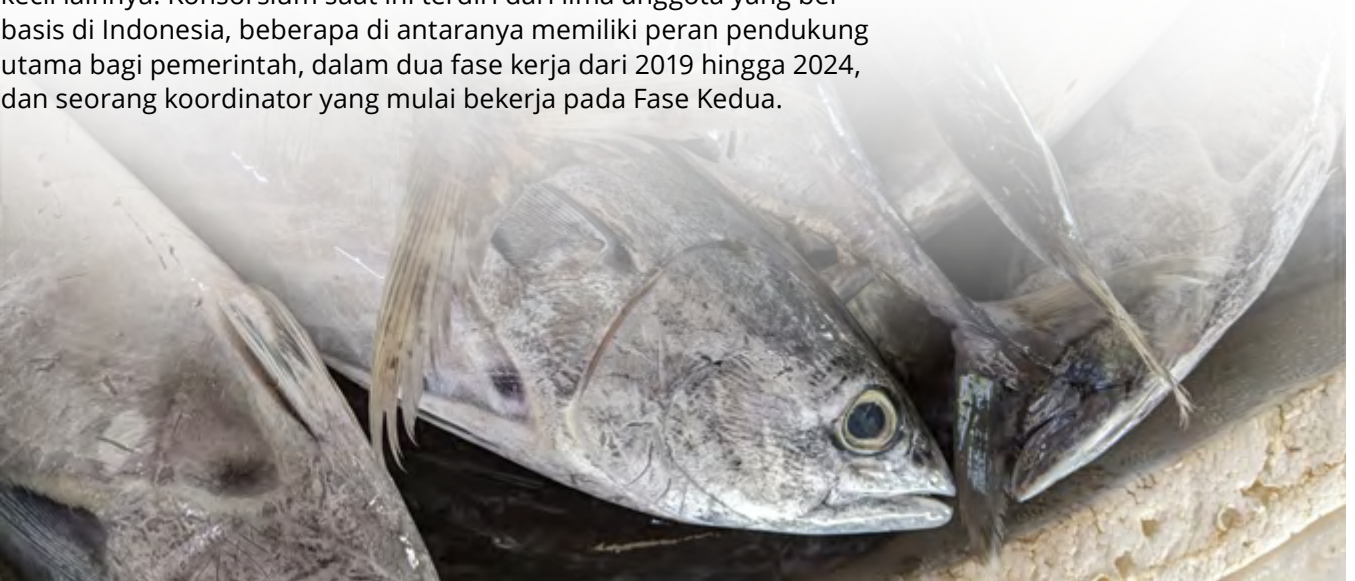
peluang untuk meningkatkan atau mempertahankan akses pasar untuk produk tuna, sebab program sertifikasi produk kelautan berkelanjutan semakin menentukan bahwa perikanan sumber harus adanya strategi pemanfaatan.

Singkatnya, mengembangkan strategi pemanfaatan yang komprehensif membutuhkan pemahaman yang baik tentang kondisi (*status*) perikanan dan tujuan pengelolaan perikanan yang ditetapkan. Dalam praktiknya, menilai status perikanan sebagai dasar untuk merumuskan pengelolaan membutuhkan penelitian yang mendalam dari data perikanan yang dikumpulkan secara berkala dalam jangka waktu yang panjang. Namun, dari banyaknya keterbatasan data dan kapasitas perikanan di negara-negara pesisir berkembang, seperti Indonesia, membangun pengetahuan yang cukup tentang perikanan atau memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan strategi panen yang komprehensif adalah tugas yang cukup berat dan melelahkan selama perjalanan menuju pengelolaan perikanan yang lebih baik.



KONSORSIUM TUNA INDONESIA

Konsorsium Tuna Indonesia (Konsorsium) diinisiasi pada tahun 2019 untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memformalkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna Tropis di IAW. Konsorsium ini didedikasikan untuk memastikan perikanan tuna yang sehat dan berkelanjutan serta mendukung masyarakat nelayan di seluruh Indonesia. Konsorsium bertujuan untuk mendukung pendekatan terkoordinasi dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan, menyelaraskan para pemangku kepentingan utama di seluruh sektor pemerintah, industri, dan LSM, memfasilitasi dialog dan memulai proses untuk mendukung keterlibatan kolaboratif dalam pengembangan dan implementasi strategi pemanfaatan, terutama dengan asosiasi nelayan dan pemangku kepentingan perikanan skala kecil lainnya. Konsorsium saat ini terdiri dari lima anggota yang berbasis di Indonesia, beberapa di antaranya memiliki peran pendukung utama bagi pemerintah, dalam dua fase kerja dari 2019 hingga 2024, dan seorang koordinator yang mulai bekerja pada Fase Kedua.





Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) adalah organisasi non-pemerintah yang berdedikasi dalam memajukan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat pesisir dan ekosistem laut. Dengan berfokus pada peningkatan perikanan dan pengembangan masyarakat, MDPI mendukung penguatan masyarakat pesisir dan terlibat dalam inisiatif pengelolaan perikanan yang luas untuk mendorong hasil perikanan jangka panjang. Keterlibatan MDPI dengan dan pengumpulan data dari nelayan tuna skala kecil memberikan gambaran yang berharga tentang kondisi di lapangan, yang berkontribusi secara signifikan terhadap Konsorsium dan KKP dalam pengembangan dan implementasi strategi pemanfaatan. mdpi.or.id



**Konservasi
Alam Nusantara**
Untuk Indonesia Lestari

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), mitra pelaksana utama *The Nature Conservancy* (TNC) di Indonesia, berdedikasi dalam mempromosikan berkelanjutan di bidang perikanan dan konservasi laut. YKAN bekerja untuk mengkatalisasi reformasi perikanan yang adil menuju keberlanjutan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, keterlibatan masyarakat, dan kesadaran. YKAN mentransformasi praktik perikanan tuna di Indonesia dengan memantau stok ikan, melacak kapal-kapal penangkap ikan, mengembangkan teknologi identifikasi spesies dan mempersiapkan implementasi strategi penangkapan tuna di Perairan Kepulauan Indonesia. Sebagai organisasi konservasi berbasis ilmu pengetahuan, YKAN menambahkan keahlian ilmu pengetahuan teknis perikanan yang berharga kepada Konsorsium dan mendukung KKP dalam membangun pengetahuan dan mengembangkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat untuk mencapai tujuan Strategi Pemanfaatan Tuna IAW. ykan.or.id



Yayasan IPNLF Indonesia (YII) adalah yayasan Indonesia yang terhubung dengan *International Pole and Line Foundation* (IPNLF), yang didedikasikan untuk mempromosikan perikanan tuna pancing ulur yang berkelanjutan di Indonesia. YII bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia untuk meningkatkan praktik-praktik terbaik, memastikan kepatuhan terhadap pelaporan hasil tangkapan, memantau perikanan, mengamankan akses pasar, dan menekankan tanggung jawab sosial. YII mendukung penggunaan alat penelusuran dan peningkatan kualitas untuk memfasilitasi akses pasar bagi nelayan tuna skala kecil. iplnf.org



Marine Change bekerja dalam mengembangkan strategi dan memobilisasi investasi yang mengarah pada regenerasi ekosistem, efisiensi rantai pasokan, serta masyarakat dan bisnis yang tangguh dan berkelanjutan secara finansial. *Marine Change* menangani tantangan bisnis yang berkaitan dengan proyek perbaikan perikanan (FIP), *Marine Stewardship Council* (MSC) dan sertifikasi *FairTrade*, serta dampak ekonomi dari aturan pengendalian panen. Selama Fase Dua, *Marine Change* mendukung penyertaan sektor pukat cincin sebagai pemangku kepentingan penting dalam mendorong peningkatan pengelolaan perikanan. marinechange.com



FairTrade USA (FTUSA) adalah pemberi sertifikasi terkemuka di Amerika Utara untuk produk-produk perdagangan yang adil. Segel *Fair Trade Certified™* dari FTUSA pada sebuah produk menandakan bahwa produk tersebut dibuat sesuai dengan standar-standar ketat yang mendorong penghidupan berkelanjutan, kondisi kerja yang aman, perlindungan terhadap lingkungan, dan rantai pasok yang kuat dan transparan. Dalam Konsorsium, FTUSA bekerja sama dengan para pembeli, pemegang sertifikat, dan nelayan untuk mempromosikan produk tuna yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dari Indonesia, memperkuat koperasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik-praktik perikanan yang berkelanjutan. fairtradecertified.org



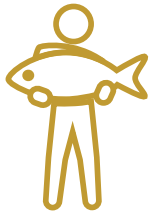
Resonance adalah lembaga terpercaya yang mengarahkan para pembuat perubahan di sektor publik dan swasta untuk memecahkan tantangan keberlanjutan yang mendesak dan kompleks secara strategis. Resonance memperkuat rantai nilai dan menciptakan peluang pasar untuk mendorong adaptasi, ketahanan, dan kesetaraan di dunia yang terkena dampak iklim. Dengan melibatkan sektor swasta, Resonance telah menjadi pemimpin utama dalam mengembangkan strategi keberlanjutan dan pendekatan pengelolaan sumber daya alam untuk perikanan, kehutanan, tata guna lahan, dan pengelolaan air. Melalui pengalamannya dalam fasilitasi dan implementasi kemitraan, Resonance bekerja untuk mengkatalisasi kewirausahaan, investasi, dan inovasi untuk membantu klien mengatasi tantangan bisnis dan pembangunan. Resonance merupakan sekretariat utama untuk Konsorsium Tuna Indonesia pada fase kedua dari tahun 2022 hingga 2024. resonanceglobal.com

DUKUNGAN KONSORSIUM TUNA INDONESIA

KETERLIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

6.300

NELAYAN &
PROFESIONAL PERIKANAN



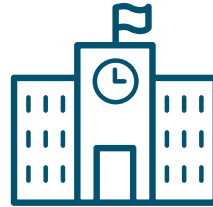
73

PERUSAHAAN, PEMASOK
DAN PEMROSES



6

LEMBAGA
PENDIDIKAN TINGGI



53

DESA NELAYAN



PENGEMBANGAN STRATEGI PEMANFAATAN

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
DARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN
DI IAW



324.036 FOTO TUNA
214 TITIK Pendaratan
DISURVEI
12 PENGAMAT DI 133 KAPAL

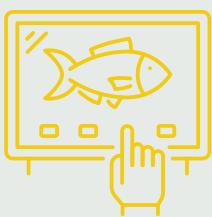


MENDUKUNG FINALISASI &
PELUNCURAN DOKUMEN,
& PERSIAPAN
IMPLEMENTASI

MENENTUKAN 12
INDIKATOR
SOSIO-EKONOMI



KETERLIBATAN PARA PIHAK



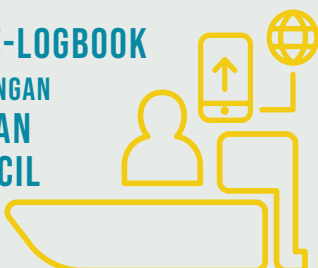
PENINGKATAN
KETERTELUKURAN
IKAN
MENDORONG
SERTIFIKASI



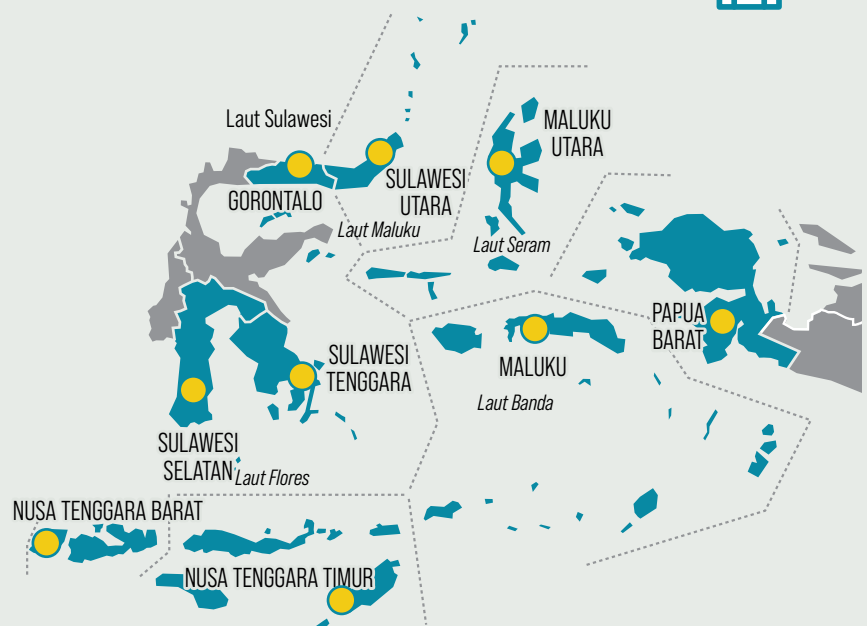
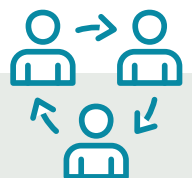
REPRESENTASI
SEKTOR PERIKANAN
PUKAT CINCIN



UJICOBA E-LOGBOOK
DARI KKP DENGAN
54 NELAYAN
SKALA KECIL



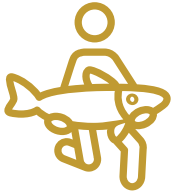
FASILITASI 39 PERTEMUAN KOMITE PENGELOLA
PERIKANAN BERSAMA & 3 PERTEMUAN REGIONAL



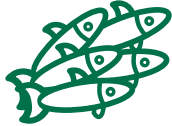
UNTUK STRATEGI PEMANFAATAN TUNA DI IAW

TONGGAK PENTING PROSES PENGEMBANGAN STRATEGI PEMANFAATAN

**HARVEST CONTROL RULES
(HCR) DISEMPURNAKAN**



**RENCANA
PENGURANGAN
TANGKAPAN
DIKEMBANGKAN**



**3 TINDAKAN
PENGELOLAAN
UTAMA DISETUJUI**



**STRATEGI
PEMANFAATAN TUNA
DI IAW DILUNCURKAN**



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



**PENINGKATAN
LITERASI
KEUANGAN
DENGAN 250
KELUARGA NELAYAN**



**105 'CHAMPION' NELAYAN
DILATIH SEBAGAI KATALISTOR
PERUBAHAN POSITIF
54 % PEREMPUAN**



**729 KAPAL
TERDAFTAR**



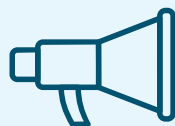
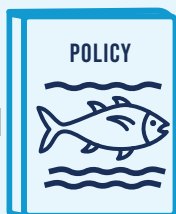
**539 NELAYAN DISERTIFIKASI
DALAM PENANGANAN IKAN
& KUALITAS IKAN**



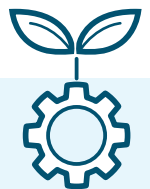
**REGISTRASI DAN PERIZINAN
ALAT PENGUMPUL IKAN
YANG KE-2 DI INDONESIA**

AKSI BERSAMA

**MEWUJUDKAN
KEBIJAKAN &
PROGRAM PERIKANAN
TUNA YANG
BERKELANJUTAN**



**MENGADVOKASI UNTUK
SUARA NELAYAN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**



**5
ANGGOTA KONSORSIUM
DI INDONESIA**



**BERKOLABORASI ERAT DENGAN
KKP & PEMERINTAH
DI 9 PROVINSI DI IAW**

**KOORDINASI
PARA PIHAK**



NOVEMBER 2021–JUNI 2024 (FASE DUA)

TEMA 1. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMANFAATAN: MEMAJUKAN KERANGKA KERJA TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN

HAL-HAL PENTING:

- ➔ Membantu menyelesaikan dokumen teknis untuk Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna Tropis di Perairan Kepulauan Indonesia (IAW) untuk WPP 713, 714, dan 715, dengan pengurangan tangkapan sebesar 10 persen dalam tiga tahun dan tindakan pengelolaan prioritas untuk memastikan keberlanjutan perikanan tuna di IAW.
- ➔ Memperkuat basis bukti untuk pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan di IAW melalui penelitian yang ditargetkan dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
- ➔ Memfasilitasi masukan untuk implementasi strategi pemanfaatan dengan para ahli dari pemerintah, LSM, dan akademisi, yang menghasilkan rencana aksi untuk mengimplementasikan tindakan pengelolaan.



MEMAJUKAN STRATEGI PEMANFAATAN TUNA DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA

Pengembangan strategi pemanfaatan berbasis bukti dan teruji secara ilmiah untuk perikanan tuna di Perairan Kepulauan Indonesia (*Indonesia Archipelagic Waters*, IAW) dapat terlaksana dengan baik berkat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun pengetahuan dan kapasitas, serta pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan mengenai elemen-elemen penting dalam pengelolaan dan praktik perikanan.

Pada **tahun 2014**, KKP mulai mengembangkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW. Selama empat tahun berikutnya, KKP berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi, lokakarya teknis, dan sesi pelatihan yang mencakup penilaian stok, konsep strategi pemanfaatan, serta pemanfaatan dan evaluasi. Pemangku kepentingan utama termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, pakar teknis nasional dan internasional, dan LSM. KKP juga memprakarsai peninjauan kolaboratif terhadap ketersediaan data perikanan tuna yang berkala, memilih rangkaian data yang sesuai, dan menyesuaikan parameter untuk digunakan dalam Strategi Panen Tuna IAW. Tinjauan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pengumpulan data selama pengembangan dan implementasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna IAW.

Pada **tahun 2018**, KKP mengeluarkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW sementara. Dokumen sementara ini memasukkan masukan dari para pemangku kepentingan dan memprioritaskan lima tindakan pengelolaan untuk tuna di IAW, yang dipersempit dari lima belas langkah awal pada awal proses konsultasi. Pada pertemuan Ilmiah *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) tanggal 8–16 Agustus 2018, di Busan Korea, Dokumen Interim Strategi Pemanfaatan Tuna di Perairan Kepulauan Indonesia diadopsi menjadi dokumen WCPFC dengan nomer WCPFC-SC14-2018/MI-IP-06. Meskipun Strategi Pemanfaatan Tuna IAW sementara merupakan tonggak penting untuk pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan di IAW hal itu hanya bersifat praktis dengan aturan pengendalian pemanfaatan (*Harvest Control Rule*, HCR) yang diperlukan untuk mendukung pendekatan manajemen adaptif. Kerangka kerja strategi ini menetapkan langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan Strategi Pemanfaatan Tuna IAW, dengan fokus pada pengujian dan penyempurnaan pendekatan dalam WPP 713, 714, dan 715.

PENDEKATAN KOLABORATIF UNTUK FINALISASI STRATEGI PEMANFAATAN

Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW dikembangkan melalui proses konsultatif selama sembilan tahun di antara para pengelola perikanan Indonesia, lembaga pemerintah, ilmuwan nasional dan internasional, industri, asosiasi penangkapan ikan, komunitas nelayan skala kecil, dan organisasi non-pemerintah (LSM). Pengalaman Konsorsium yang mendukung proses ini menyoroti kemajuan signifikan pada upaya pencapaian tingkat keterlibatan dan kolaborasi yang memadai sehingga dapat dikatakan telah meletakkan landasan penting dan menentukan arah masa depan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan praktik terbaik di Indonesia¹¹.

Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan serta menetapkan arah tujuan dalam rangka meningkatkan dukungan pemangku kepentingan perikanan tuna dan memastikan transparansi dalam prosesnya, yang menjadi landasan pendekatan KKP. Konsorsium bekerja tanpa lelah untuk mendukung KKP dalam pendekatan ini, membangun basis bukti tentang sektor perikanan dan isu-isu pengelolaan terkait di IAW, memfasilitasi penyempurnaan dokumen dan bergerak menuju implementasinya.

Instansi Pemerintah Utama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)
- Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDI)
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)

Anggota Kelompok Kerja Teknis dan Kontributor

- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pusat Riset Kelautan dan Perikanan (PusRisKan)
- Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
- Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
- Yayasan IPNLF Indonesia (YII)
- Asosiasi Penangkapan Ikan
- ACIAR-CSIRO
- Akademisi

Konsultasi Pemangku Kepentingan

- USAID Ber-IKAN
- BRIN dan PusRisKan
- YKAN
- MDPI
- YII
- LSM lainnya
- Asosiasi penangkapan ikan
- Industri
- Akademisi

Pada **tahun 2019**, KKP memulai menguji coba skenario model operasi (MO), yang mensimulasikan berbagai aspek sistem perikanan tuna dan strategi penangkapannya, dengan menggunakan Evaluasi Strategi Manajemen (ESM). Pada tahun yang sama, KKP memprakarsai proses multipihak untuk meninjau ulang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol (RPP-TCT). Pada periode ini, Konsorsium Tuna Indonesia (Konsorsium) diluncurkan untuk mendukung KKP dalam upaya memperkuat pengumpulan data dan memfasilitasi konsultasi pemangku kepentingan dalam proses pengembangan Strategi Pemanfaatan Tuna IAW. KKP mengesahkan revisi RPP-TCT pada tahun 2021¹⁰, dengan penekanan pada peningkatan pengumpulan data, penilaian, dan penelitian untuk mendukung tujuan ganda pengelolaan stok tuna yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi perikanan tuna melalui upaya yang mendukung para pemangku kepentingan bisnis dan industri untuk memenuhi persyaratan sertifikasi pasar.

Selama periode **tahun 2021-2023**, KKP menyempurnakan MO, mengembangkan rencana pengurangan tangkapan yang bersifat pencegahan, dan menyepakati tiga langkah pengelolaan prioritas yang menjadi inti dari Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna Tropis di Perairan Kepulauan Indonesia untuk WPP 713, 714, dan 715. Konsorsium membantu KKP dalam periode ini dengan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pertemuan multi-pihak pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan dalam pengembangan strategi. Konsorsium juga memberikan dukungan teknis dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan pemantauan sumber daya sebagai masukan penting bagi strategi pemanfaatan secara terukur dan adaptif. Pada tanggal 08 Juni 2023, KKP secara resmi meluncurkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW.

Laporan ini menyoroti aspek-aspek utama dari kontribusi Konsorsium selama Fase Dua dalam mendukung proses pengembangan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW selama tahun 2021-2023.

DUKUNGAN KUNCI KONSORSIUM TUNA TERHADAP PROSES PENGEMBANGAN STRATEGI PEMANFAATAN

Konsorsium mendukung KKP dalam rangka memperkuat pengumpulan data, dan memfasilitasi kontribusi pemangku kepentingan pada pengembangan strategi pemanfaatan.

Anggota Konsorsium memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan dan lokakarya teknis dalam seluruh tahapan proses serta mendukung, menkoordinasikan, dan memfasilitasi pertemuan untuk finalisasi strategi panen.



KONSORSIUM TUNA FASE SATU

- Mendukung fasilitasi para pemangku untuk KKP
- Koordinasikan masukan dari pihak industri dan nelayan terhadap strategi pemanfaatan
- Membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan
- Memberikan anjuran teknis kepada KKP terhadap seleksi dan pelaksanaan strategi pemanfaatan
- Kolaborasi dengan industri dan asosiasi perikanan untuk menguatkan pengumpulan data
- Mendukung industri dan para nelayan skala kecil untuk mendapatkan sertifikasi ekologi

▼ (Dilanjutkan pada Fase Dua)

KONSORSIUM TUNA FASE DUA

- Menyelenggarakan dan menghadiri di forum internasional mempromosikan tuna Indonesia
- Melakukan penelitian terfokus yang menginformasikan strategi pemanfaatan
- Mengembangkan kapasitas nelayan skala kecil dalam perikanan berkelanjutan
- Koordinasi forum pengembangan pengetahuan dengan para pihak di tingkat lokal, daerah dan nasional
- Berkontribusi terhadap finalisasi aturan pengendalian pemanfaatan
- Koordinasi seleksi indikator sosial-ekonomi
- Mendukung KKP dan BRIN untuk rilis strategi pemanfaatan
- Memfasilitasi diskusi pengalih terhadap pelaksanaan tindakan pengelolaan

KONSORSIUM TUNA FASE TIGA

- Mempertahankan momentum untuk implementasi

2014

INISIASI

- ▶ KKP INISIASI PROSES PENGEMBANGAN STRATEGI PEMANFAATAN TUNA DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA

2015-2017

PENGEMBANGAN

- ▶ RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA 2015

ASESMEN KETERSEDIAAN DATA PERIKANAN TUNA
PERSETUJUAN TUJUAN PENGELOLAAN
SELEKSI 5 TINDAKAN PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA

2018 PELAKSANAAN & PENYEMPURNAAN

- ▶ PENGEMBANGAN RENCANA AKSI UNTUK PENYEMPURNAAN DAN PELAKSANAAN

- ▶ KKP MERILIS STRATEGI PEMANFAATAN SEMENTARA

2019

PENGUJICOBAAN SKENARIO MODEL OPERASI MENGGUNAKAN EVALUASI STRATEGI MANAJEMEN

2020

INISIASI REVISI RENCANA PENGELOLAAN TUNA NASIONAL

2021

PENGUJICOBAAN LANJUTAN MODEL OPERASI

- ▶ KKP MERILIS RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA, CAKALANG, DAN TONGKOL TERBARU

2022

PENYEMPURNAAN MODEL OPERASI
PENGEMBANGAN RENCANA PENGURANGAN TANGKAPAN YANG BERSIFAT PENCEGAHAN
PERSETUJUAN 3 TINDAKAN PENGELOLAAN

2023

- ▶ KKP MERILIS STRATEGI PEMANFAATAN TUNA TROPIS DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA UNTUK WPP 713, 714, & 715

2024



PELUNCURAN STRATEGI PEMANFAATAN PERIKANAN TUNA DI IAW

Pada tanggal 8 Juni 2023, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP, secara resmi meluncurkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW untuk wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713, 714 dan 715.

Sebelumnya, pada Pertemuan Ilmiah WCPFC di Busan, Korea Selatan, tanggal 08–16 Agustus 2018, dokumen interim Strategi Pemanfaatan Tuna di Perairan Kepulauan Indonesia diadopsi menjadi dokumen WCPFC dengan nomor WCPFC-SC14-2018/MI-IP-06.



BERKONTRIBUSI PADA PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA REGIONAL

Konsorsium mendukung keanggotaan Pemerintah Indonesia dalam pertemuan dan forum RFMO WCPFC untuk meningkatkan perannya dalam pengelolaan perikanan tuna di tingkat regional:

Pertemuan	Dukungan Konsorsium	Hasil Dukungan
14th Annual Tuna Fisheries Catch Estimates Review (IT-FACE 14)	Berkolaborasi dengan KKP, BRIN, dan Komunitas Pasifik (SPC) untuk memfasilitasi lokakarya	- Kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan tahunan anggota RFMO - Merekomendasikan untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah dan pengamat perikanan rawai
Komite Ilmiah	Mendukung data tangkapan dan upaya agregat dan lokakarya analisis kesenjangan	Pemahaman tentang pembuatan data tangkapan dan upaya agregat untuk persyaratan WCPFC, serta data buku catatan dan pengamat dari perikanan tuna
Komite Kepatuhan Teknis	- Meninjau langkah-langkah pengelolaan perikanan tuna - Terlibat dalam penyusunan sebuah tulisan posisi (<i>Position Paper</i>) untuk pertemuan RFMO	Mengakui peran lembaga pemerintah dalam verifikasi dan validasi data untuk memenuhi persyaratan pelaporan RFMO
Pertemuan persiapan WCPFC20	- Diskusi yang berkontribusi pada pengembangan strategi pemanfaatan - Memfasilitasi pertemuan dengan KKP dan AP2HI	- Peninjauan dan revisi dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW - Rekomendasi yang dibuat untuk sebuah tulisan posisi (<i>Position Paper</i>) delegasi

PERAN PADA PROSES PENGEMBANGAN STRATEGI PEMANFAATAN

PUSAT RISET PERIKANAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

- ~ Membentuk kelompok kerja teknis untuk memberikan saran pada proses yang berlangsung
- ~ Melakukan penilaian stok dan memberikan panduan seputar status stok
- ~ Memastikan analisis data yang tepat
- ~ Mendukung pemodelan sebagai titik referensi dan mengidentifikasi aturan pengendalian pemanfaatan potensial

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN - DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

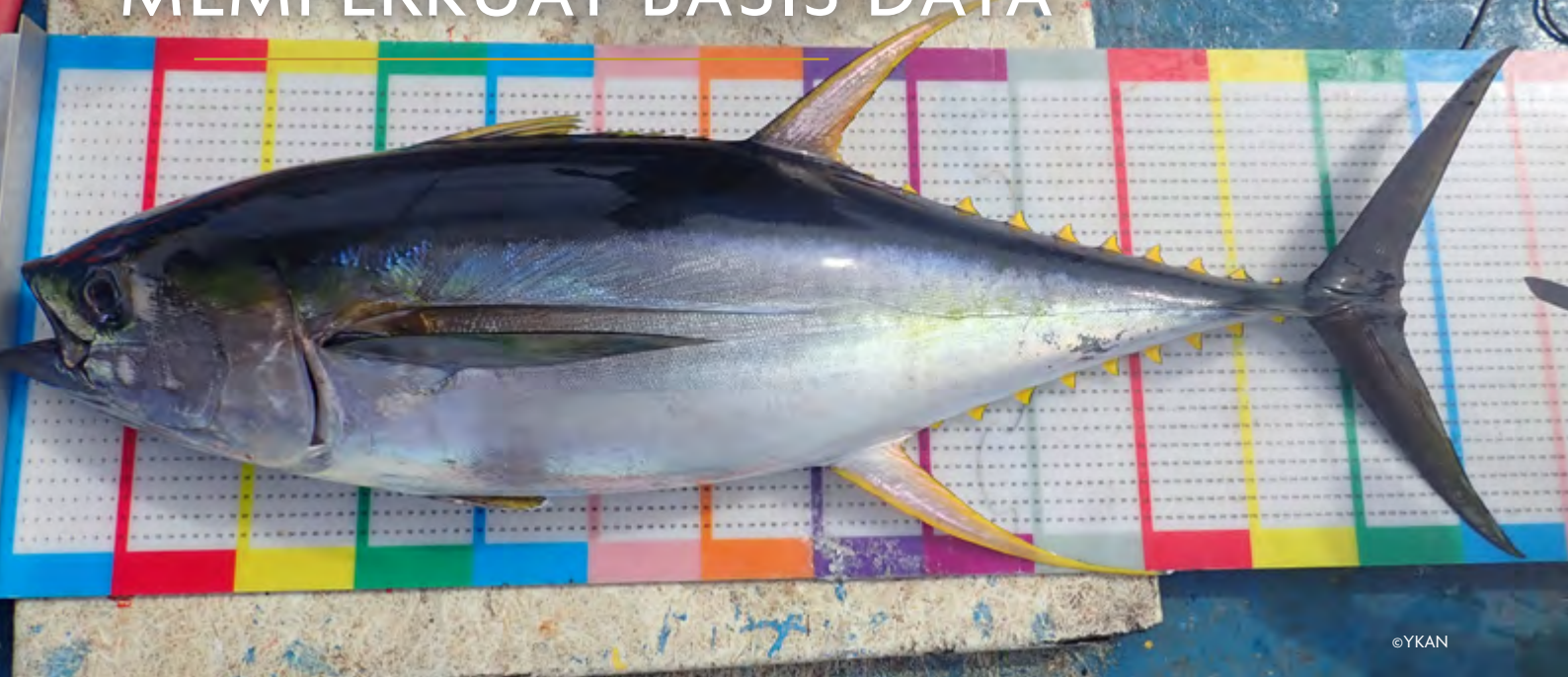
- ~ Wewenang pengambilan keputusan tentang titik referensi dan aturan pengendalian pemanfaatan
- ~ Mengkoordinasikan partisipasi dan konsultasi para pemangku kepentingan
- ~ Membentuk komite pengarah
- ~ Melaporkan perkembangan proses dan mencari masukan dari para pemangku kepentingan sektor perikanan

KONSORSIUM TUNA INDONESIA / MITRA STRATEGIS

- ~ Mendukung fasilitasi konsultasi dan mengoordinasikan masukan dari para pemangku kepentingan
- ~ Berkontribusi pada pengumpulan dan analisis data
- ~ Implementasi skema sertifikasi
- ~ Mendukung sosialisasi tindakan dan keputusan pengelolaan

Gambar 3. Peran penting pemerintah dan non-pemerintah dalam mengembangkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW.

MEMPERKUAT BASIS DATA



©YKAN

Anggota Konsorsium berkontribusi besar dalam memajukan penelitian dan meningkatkan pengumpulan data perikanan untuk menginformasikan pengembangan dan finalisasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW. Kontribusi data dari Konsorsium kepada Tim Strategi Pemanfaatan Teknis KKP untuk Tuna Tropis di IAW sangat penting untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang solid dan berbasis sains. Hasil utama dari keterlibatan Konsorsium dengan KKP adalah peningkatan koordinasi dan kemitraan di antara organisasi dan program yang terlibat dalam pengumpulan data perikanan tuna. Sebelum tersusunnya Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW, beberapa LSM dan lembaga lain mengumpulkan data perikanan dalam berbagai format untuk keperluan pemantauan atau penelitian mereka sendiri. Melalui lokakarya teknis, Konsorsium mendukung KKP untuk mengintegrasikan berbagai kumpulan data dari mitra strategis—sebagian besar LSM—ke dalam kerangka kerja pemantauan pemerintah untuk memungkinkan para ilmuwan Indonesia memperoleh data kesehatan stok secara lebih akurat dan memberikan umpan balik bagi pengelolaan tuna di perairan kepulauan.

MEMBANGUN GAMBARAN YANG LEBIH BAIK TENTANG PERIKANAN

Melalui proses pengembangan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW, KKP meng-atasi tantangan pengumpulan data secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan yang menyediakan data untuk memenuhi tujuan bersama dalam meningkatkan pemahaman tentang

karakteristik perikanan dan pengelolaan perikanan tuna. Anggota Konsorsium menyumbangkan data dan analisis data penting dari daerah penangkapan ikan di IAW.

Anggota Konsorsium, YKAN, melakukan studi tentang alat bantu pengumpul ikan (rumpon) dan perikanan pukat cincin di perairan kepulauan Indonesia. Hal ini termasuk mengumpulkan data berbasis citra dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023, yang diserahkan kepada KKP dan BRIN sebagai bagian dari kumpulan data komprehensif dari 324.036 ikan tuna yang teridentifikasi dan spesies terkait yang ditangkap dari WPP 713, 714, dan 715. Data ini diambil dari 1.370 pendaratan pancing ulur, pancing ulur, pukat cincin, dan pancing ulur. Sebuah survei komprehensif pada 214 tempat pendaratan di 41 lokasi mengonfirmasi bahwa lebih dari 1.700 kapal pukat cincin beroperasi di wilayah tersebut, yang sebagian besar adalah kapal di bawah 30 GT. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nelayan pukat cincin sangat bergantung pada rumpon untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasinya.

Sebanyak 20 kapal pukat cincin yang dipantau tidak melakukan pengaturan pada rumpon. Pada pancing ulur, temuan menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dalam hal ukuran rata-rata ikan, yaitu antara ikan yang ditangkap di rumpon dan tanpa rumpon. Ikan cakalang dan tuna sirip kuning yang menggunakan rumpon berukuran sekitar enam hingga tujuh cm lebih kecil daripada ikan yang ditangkap dari gerombolan ikan yang berenang bebas. Data yang terperinci ini sangat berguna bagi para pengelola perikanan dan pembuat kebijakan yang

berurusan dengan pembatasan rumpon sebagai tindakan pengelolaan.

Untuk menekankan nilai dan penerapan pengambilan keputusan berbasis data, anggota Konsorsium, YKAN, merilis hasil investigasi mengenai komposisi tangkapan dan karakteristik armada perikanan tuna di IAW. Berdasarkan penilaian panjang ikan tuna sirip kuning dan cakalang di IAW tahun 2020, laporan ini mengevaluasi hasil dari berbagai skenario penangkapan dan menawarkan opsi pengelolaan serta langkah-langkah untuk menyeimbangkan prioritas ekonomi dengan konservasi stok.

Investigasi ini mencakup survei kerangka kapal penangkap tuna di IAW dan survei tangkapan menggunakan *Crew-Operated Data Recording System* (CODRS) berbasis citra, yang menggabungkan data tangkapan dengan pelacakan lokasi. Penggunaan CODRS menggambarkan penerapan pendekatan pengumpulan data yang hemat biaya dan terukur untuk menjawab tantangan pengumpulan data perikanan tuna di IAW. Hal ini menekankan pada pentingnya pengambilan keputusan yang baik dan pengelolaan yang kooperatif, dimana data dan

analisis berkontribusi terhadap evaluasi strategi pemanfaatan yang komprehensif.

Anggota Konsorsium juga menyumbangkan data dari program pemantauan di atas kapal, karakterisasi perikanan tuna melalui pengukuran hasil tangkapan, spesies dan ukuran, alat tangkap dan jenis kapal, interaksi rumpon dan spesies yang terancam punah dan dilindungi (*endangered, threatened and protected*—ETP), lokasi tangkapan relatif terhadap batas-batas tata kelola. Mendukung KKP meningkatkan cakupan pemantauan di IAW, anggota Konsorsium, YII, berkolaborasi dengan Asosiasi Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) untuk mengerahkan 12 pengamat yang ambil data dari 133 kapal pancing ulur dan 12 perusahaan.

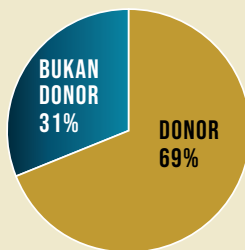
Mempertahankan pengumpulan dan penelitian data yang komprehensif, dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pemantauan KKP dalam jangka waktu yang panjang akan sangat penting untuk keberlanjutan dan daya tanggap Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW. Hal ini akan memungkinkan adanya modifikasi dokumentasi berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

PENDANAAN UNTUK Mendukung Strategi Pemanfaatan Tuna di IAW

Sejak 2019, Konsorsium Tuna Indonesia telah menggalang dana lebih dari US\$ 310.000, termasuk US\$ 230.000 dari para donatur dan hampir US\$ 80.000 dari sumber non-filantropis. Sekitar US\$ 235.000 dari dana tersebut telah dimanfaatkan oleh anggota Konsorsium MDPI dan YII untuk mentransisi biaya untuk pengumpulan data rutin yang berkelanjutan dan upaya peningkatan rantai pasok ke sumber pendanaan lainnya. Sedangkan Resonance berhasil memanfaatkan US\$ 75.000.

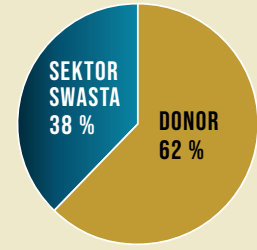
PENGUMPULAN DANA Rutin:

US\$ 155.673 Dileverasi oleh MDPI



Peningkatan Rantai Pasok:

US\$ 80.620 Dileverasi oleh YII



~ DAMPAK PENDANAAN



Tersedianya data untuk mendukung kebijakan pengelolaan perikanan tuna.



Sampel data pelabuhan digunakan dalam pengembangan strategi pemanfaatan dan penentuan komposisi tangkapan tuna handline di wilayah WCPFC.



Data digunakan dalam lokakarya estimasi tangkapan tahunan (ITFACE-14).

~ SUMBER PENDANAAN DAN PENERAPAN

\$50,000

Hibah persiapan dari World Bank Standards and Trade Development Facility untuk peningkatan penanganan.



\$16,000

Terhubung pada UNDP Ocean Innovation Challenge Award untuk energi terbarukan dalam perikanan tuna skala kecil Indonesia.

\$12,700

Mendukung sertifikasi FairTrade USA untuk perikanan tuna skala kecil di Indonesia

\$1,560

Menyediakan 3 sistem pelacakan elektronik.

Gambar 4. Pendanaan yang dimanfaatkan oleh Konsorsium Tuna untuk pengumpulan data dan perbaikan rantai pasok dalam mendukung Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW.

MENGINFORMASIKAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN RUMPON

Di Indonesia, peraturan untuk mengendalikan penggunaan rumpun telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertengahan tahun 1990-an. Strategi pengelolaan rumpun perlu mempertimbangkan dampak dari tindakan pengendalian terhadap nelayan skala kecil, nelayan komersial dan stok ikan, serta ekosistem laut yang lebih luas, dan idealnya harus didasari oleh pemahaman yang rinci tentang status stok, data tangkapan, dan dinamika armada penangkapan ikan.

Menyadari perlunya pengelolaan rumpun yang lebih baik di perikanan tuna Indonesia, Konsorsium mendukung KKP dalam mengumpulkan pengetahuan para ahli untuk memberikan saran perbaikan. Anggota Konsorsium, YII, melakukan penelitian memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek sosial dan ekologi dari penggunaan rumpun berlabuh. Tinjauan ini mempertimbangkan biaya dan manfaat bagi perikanan dan nelayan serta dampak rumpun terhadap kesehatan dan hasil tangkapan ikan, sejarah hidup dan pola migrasi tuna.

YII juga menyelesaikan tinjauan terhadap kerangka kerja kebijakan Indonesia untuk pengelolaan rumpun, termasuk perbandingan peraturan Indonesia dengan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang direkomendasikan oleh RFMO yang memprioritaskan pengendalian rumpun dalam jangka panjang untuk meminimalkan ancaman terhadap sumberdaya tuna. Sejak tahun 2021 hingga 2022, KKP mengeluarkan beberapa peraturan yang melibatkan pengelolaan rumpun, termasuk membatasi jumlah dan jenis rumpun per operator penangkapan ikan atau koperasi berdasarkan skala dan wilayah operasi mereka (perairan teritorial atau laut lepas)¹², melarang rumpun di WPP 714¹³, dan standar kegiatan perikanan untuk nelayan dengan izin rumpun yang sudah habis masa berlakunya¹⁴. Tinjauan kebijakan yang mendalam menemukan bahwa peraturan-peraturan ini secara umum sesuai dengan persyaratan WCPFC.

Anggota Konsorsium, MDPI, YII dan YKAN, berkolaborasi untuk menyelenggarakan forum rumpun nasional di Jakarta yang mempertemukan perwakilan pemerintah, mitra industri, asosiasi nelayan, kelompok nelayan, dan LSM. Forum ini berbagi pengetahuan tentang topik seperti perencanaan, pengelolaan dan perizinan rumpun, perspektif industri tentang pendaftaran rumpun,



KONTEKS RUMPON DALAM PERIKANAN TUNA DI INDONESIA

Rumpun atau *Fish Aggregating Device* (FAD) adalah struktur yang dipasang di laut lepas untuk meniru bahan organik alami yang mengapung di permukaan. Tuna berkumpul di bawah Rumpun untuk memangsa ikan yang lebih kecil yang tertarik ke tempat berlindung, dan untuk pemijahan. Rumpun umumnya digunakan dalam perikanan tuna di Indonesia karena nelayan tuna dapat menghemat waktu dan bahan bakar untuk menemukan titik penangkapan ikan yang produktif. Namun, peningkatan pesat instalasi dan penggunaan rumpun di daerah penangkapan ikan tuna pada tahun 2000-an menyebabkan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, termasuk penangkapan ikan yang berlebihan dan konflik antara pengguna rumpun.

hasil tinjauan kebijakan YII, dan sosialisasi YKAN tentang penggunaan rumpun oleh pukat cincin.

Di tingkat provinsi, MDPI menyelenggarakan Forum Rumpun untuk membangun pemahaman tentang peraturan baru terkait rumpun, memudahkan penerapannya oleh para manajer perikanan, dan mendukung implementasi langkah-langkah pengelolaan rumpun di masa depan dalam Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW.

MENENTUKAN INDIKATOR SOSIO-EKONOMI

Anggota Konsorsium, YII, menyelenggarakan empat lokakarya dengan berbagai pemangku kepentingan yang berfokus pada penyempurnaan pendekatan untuk mengembangkan indikator sosio-ekonomi untuk Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW. Proses ini melibatkan perwakilan pemerintah,

akademisi, asosiasi, sektor swasta, anggota Konsorsium dan LSM lainnya, dan menghasilkan dua belas indikator utama untuk memantau kondisi sosial-ekonomi nelayan dan perikanan di IAW. Para pemangku kepentingan memetakan data yang tersedia dan mengumpulkan data potensial untuk memungkinkan pengukuran indikator melalui kerangka kerja pengumpulan data terpadu.

LSM yang terlibat dalam lokakarya berkomitmen untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi yang relevan untuk memantau dampak implementasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di KPI dan untuk menginformasikan pengambilan keputusan di masa depan untuk perikanan tuna. Anggota Konsorsium menggunakan lokakarya ini untuk membangun hubungan kolaboratif antara pemangku kepentingan pada tingkat pemerintah dan non-pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan data dan mekanisme berbagi data. Lokakarya ini memiliki partisipasi peserta yang terus meningkat, yang menunjukkan kemajuan yang sukses menuju lingkungan yang lebih kolaboratif dan inklusif.

TINDAKAN PENGELOLAAN PRIORITAS DAN FINALISASI STRATEGI PEMANFAATAN

Proses teknis dan konsultatif berpuncak pada finalisasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW oleh KKP pada awal pertengahan tahun 2023. Anggota Konsorsium, YKAN, dan para ahli lainnya memberikan dukungan teknis kepada KKP dan BRIN pada tahap akhir penyusunan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW, khususnya dalam penyempurnaan teknis dan diskusi mengenai keterkaitan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang baru¹⁵ (kebijakan PIT), yang perlu dipertimbangkan dalam finalisasi strategi. Tindakan pengelolaan dan kontrol dalam Strategi Pemanfaatan, selama diimplementasikan, bermaksud memungkinkan perikanan tuna beroperasi secara berkelanjutan dan mencapai sertifikasi perikanan berkelanjutan yang baru, atau mempertahankan sertifikasi yang sudah ada saat ini, yang merupakan prasyarat penting untuk mengakses pasar bernilai lebih tinggi.

Setelah dokumen tersebut dirilis, keterlibatan Konsorsium dengan para ahli di Indonesia terus berlanjut. Anggota Konsorsium, MDPI, berkolaborasi dengan USAID Ber-IKAN¹⁶ untuk mendukung KKP, LSM, dan akademisi dalam menyusun rencana aksi yang akan menjadi pedoman untuk mengatasi

Tiga tindakan pengelolaan utama merupakan inti dari Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW untuk menjamin keberlanjutan sumber daya tuna sirip kuning, tuna mata besar, dan cakalang:

1. **Pembatasan penggunaan alat bantu pengumpul ikan (rumpon)**
2. **Penutupan spasial (daerah pemijahan atau asuhan penting) dan penutupan sementara (selama peristiwa penting, seperti pemijahan)**
3. **Batas Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) per wilayah pengelolaan perikanan (WPP).**

ketidakpastian dalam mengimplementasikan ketiga tindakan pengelolaan tercantum diatas.

Pekerjaan tambahan diperlukan untuk mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, meningkatkan pengumpulan data untuk mengukur status stok, dan melakukan pengujian yang lebih komprehensif untuk memastikan ketangguhan strategi, kepraktisan implementasi, dan konsistensi dengan peraturan pemerintah dan penilaian stok WCPFC. Pemerintah Indonesia melanjutkan kolaborasi dengan para ahli ilmiah untuk menyelesaikan parameter biologis tuna dan mengembangkan model operasi berbasis upaya atau tangkapan. Sementara pekerjaan ini berlanjut selama tiga tahun ke depan, para pemangku kepentingan menyetujui pengurangan tangkapan sebesar sepuluh persen dari tingkat tangkapan tahun 2021, dimana secara bertahap dengan pengurangan empat persen pada tahun pertama dan tiga persen pada masing-masing dua tahun berikutnya.



TEMA 2. PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN: PENGELOLAAN BERSAMA YANG INKLUSIF DAN KETERLIBATAN RANTAI PASOKAN

HAL-HAL PENTING:

- ➔ Mengorganisasikan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBK) sebagai platform penting untuk konsultasi subnasional tentang pengelolaan perikanan tuna dengan pemerintah, industri, nelayan, dan LSM.
- ➔ Mendukung Asosiasi Purse Seine Indonesia (APSI) untuk meningkatkan keterlibatan industri perikanan cincin dengan pemerintah menuju peningkatan pengelolaan perikanan.
- ➔ Memperkuat keterlibatan nelayan skala kecil dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan dengan mempromosikan pelaporan hasil tangkapan menggunakan buku catatan elektronik KKP.
- ➔ Bersama-sama dengan pemerintah menyelenggarakan International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF) ke-7 dan Indonesia Tuna Conference (ITC) pertama, yang dihadiri oleh lebih dari 200 delegasi nasional dan internasional.



KOORDINASI DAN KERJA SAMA: MENDUKUNG KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN

Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBK) berada pada tingkat provinsi dan regional. Komite ini berfungsi sebagai ruang inklusif untuk komunikasi pemangku kepentingan, analisis data perikanan, dan diskusi tentang isu-isu pengelolaan perikanan yang muncul.

KPBK adalah ruang penting di mana lembaga pemerintah, mitra industri, asosiasi, akademisi, peneliti, LSM, nelayan, dan pemasok *mini-plant suppliers* berkumpul untuk berbagi perspektif unik mereka tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan. Para peneliti dan LSM menyumbangkan hasil temuan mereka untuk pengembangan kebijakan, nelayan memberikan konteks untuk menerapkan kebijakan di lapangan, dan pemerintah mengumpulkan masukan untuk merumuskan kebijakan perikanan demi hasil yang berkelanjutan, termasuk Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW dan Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol (RPP-TCT).

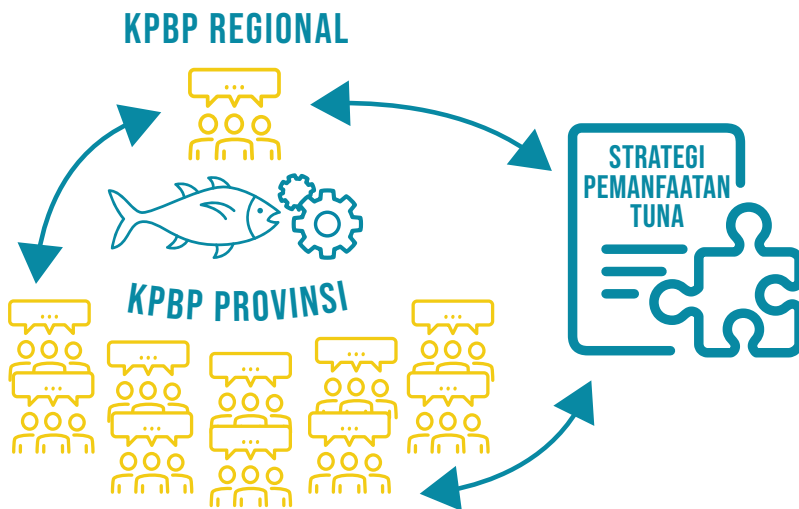
Di tingkat provinsi, KPBK tuna bertemu dua kali dalam setahun dengan tujuan memperkuat koordinasi pemangku kepentingan dan membangun kebijakan perikanan yang lebih kuat. Perwakilan dari KPBK tingkat provinsi juga berpartisipasi dalam pertemuan tahunan KPBK regional yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan perikanan yang lebih luas. Dengan cara ini, KKP menyediakan informasi dua arah,

memberikan informasi tingkat provinsi tentang isu-isu pengelolaan perikanan kepada para pengambil keputusan di tingkat nasional dan memberikan informasi tingkat nasional kepada para pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

Sejak 2019, anggota Konsorsium, MDPI dan YII, telah memfasilitasi dan mengorganisir pertemuan KPBK, termasuk memastikan keterwakilan nelayan dalam forum pengelolaan. Beberapa isu populer yang dibahas dalam KPBK selama dua setengah tahun terakhir meliputi: kerja sama dengan organisasi lain untuk mengumpulkan data tuna, sosialisasi registrasi dan perizinan alat pengumpul ikan (rumpon), registrasi kapal dan izin migrasi, analisis komposisi tangkapan dan tren per provinsi, kondisi perikanan saat ini, subsidi bahan bakar untuk nelayan kecil, dan sosialisasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW.

Dalam KPBK yang dipimpin oleh MDPI, para pemangku kepentingan mengembangkan rencana kerja dan rencana aksi untuk kemajuan di antara pertemuan, yang mendorong kerja

KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KPBP)



DUKUNGAN UTAMA

Memfasilitasi para pemangku kepentingan berkontribusi terhadap pengelolaan perikanan tuna di 9 provinsi



39 PERTEMUAN KPBP PROVINSI
& 3 KPBP REGIONAL



sama dan pengorganisasian yang berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan. Isu-isu utama untuk KPBP dalam rencana aksi mereka sering kali berkisar pada penguatan perikanan, pemberdayaan masyarakat nelayan, dan navigasi proses pemerintah untuk nelayan yang patuh. KPBP telah menghasilkan karya ilmiah, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*, MoU) antara KPBP dan pemerintah Provinsi, dan kerja sama antar organisasi untuk mengumpulkan data perikanan tuna.

Nilai KPBP sebagai ruang inklusif bagi para pemangku kepentingan perikanan untuk bertukar

informasi diakui dalam investigasi yang baru-baru ini dilakukan oleh anggota Konsorsium, MDPI, kedalam pelajaran yang dapat dipetik dari KPBP¹⁷. Dari penilaian ini, beberapa kekuatan diidentifikasi, termasuk peran KPBP dalam menjembatani jarak antara para pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas partisipatif para peserta, menciptakan ruang negosiasi yang setara, dan memberikan kebebasan untuk berdiskusi secara terbuka untuk memungkinkan pemahaman bersama tentang keprihatinan masing-masing pihak dan memberikan peluang nyata untuk pemecahan masalah dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pengelolaan perikanan tuna.

MENINGKATKAN KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA BERKELANJUTAN

Pada KPBP tingkat Regional, perwakilan dari KPBP tingkat provinsi bertemu dengan perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi perikanan, dan industri untuk mendiskusikan topik-topik hangat saat ini dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan di Indonesia. Selama pengembangan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW, pertemuan KPBP tingkat regional merupakan kesempatan penting untuk mendiskusikan kemajuan dan pencapaian dokumen tersebut. Setelah Strategi Pemanfaatan dirampungkan, diskusi dikembangkan untuk mempertimbangkan implementasinya dan pengaruh kebijakan perikanan tuna dan terhadap langkah-langkah pengelolaan strategi tersebut.

Pada KPBP tingkat Regional Kelima pada bulan Juli 2023, yang diselenggarakan oleh anggota Konsorsium, MDPI, membahas topik-topik meliputi implementasi strategi dan regulasi rumpon, perizinan, dan regulasi. Baru-baru ini, pada bulan Mei 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan pertemuan KPBP tingkat Regional Keenam sebagai kesempatan untuk mempresentasikan kebijakan penangkapan ikan terukur yang baru saja dirilis (kebijakan PIT) kepada para pemangku kepentingan di tingkat regional. Kebijakan PIT mensyaratkan kuota atau alokasi sumber daya ikan Indonesia, termasuk tuna, untuk ditetapkan per Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Para nelayan yang hadir menggunakan kesempatan ini untuk mendiskusikan penerapan praktis kebijakan tersebut, dan disimpulkan bahwa sosialisasi ketentuan dan mekanisme penangkapan ikan berbasis kuota akan sangat penting untuk mendukung penerapannya.

KPBP SULAWESI TENGGARA MENGEKSPLORASI DAMPAK KEBIJAKAN PERIKANAN

Pada akhir tahun 2022, KKP Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin YII memiliki agenda yang luas untuk membahas perkembangan kebijakan perikanan terkait perizinan kapal dan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) di WPP 714, serta meninjau kemajuan proyek perbaikan perikanan (*Fisheries Improvement Project*, FIP) tuna sirip kuning dan cakalang di Sulawesi Tenggara¹⁸. Topik diskusi yang menjadi prioritas diantaranya adalah strategi penangkapan, manajemen perizinan kapal, pengumpulan data tangkapan, dan peran KPBP. Pemangku kepentingan eksternal mempresentasikan tentang penerapan kebijakan sosial dalam FIP untuk melindungi hak-hak pekerja perikanan.

'Permainan PIT' yang inovatif mensimulasikan tantangan dan peluang yang terkait dengan berbagai kebijakan dan kontrol perikanan. Skenario yang dieksplorasi dalam permainan ini termasuk perikanan tradisional, perikanan yang tidak diatur menggunakan alat tangkap yang tidak selektif, dan tiga penerapan kebijakan berbasis zona atau kuota yang berbeda untuk menggambarkan dampak dari praktik penangkapan ikan dan keputusan kebijakan. Permainan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peserta tentang maksud di balik kebijakan berbasis zona dan kuota serta menyoroti pentingnya pelaporan hasil tangkapan, langkah-langkah peraturan, dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Melibatkan pemangku kepentingan industri dalam memajukan keberlanjutan sumberdaya tuna.



KETERLIBATAN SEKTOR PUKAT CINCIN



©Toriqun Nuril Anwar

Operasi penangkapan ikan dengan pukat cincin adalah salah satu sektor terpenting dalam industri perikanan Indonesia, dengan pangsa tangkapan terbesar dari semua jenis alat tangkap. Sektor operasi penangkapan beragam, mulai dari kapal-kapal besar yang menangkap ikan di seluruh perairan teritorial Indonesia hingga kapal-kapal kecil yang beroperasi di dekat pantai. Sebagian besar kapal pukat cincin yang beroperasi di perairan kepulauan Indonesia (IAW) berukuran sedang, sekitar 20-30 GT¹⁹. Kapal yang lebih besar (> 60 GT) dengan lemari pendingin di atas kapal atau jasa pengumpul dapat melaut hingga tiga bulan dengan jumlah awak 30 orang. Penangkapan pukat cincin di perairan terbuka umumnya dianggap sebagai bentuk penangkapan ikan yang efisien, namun, ketika pukat cincin menargetkan ikan yang berkumpul di sekitar rumpon dapat mengakibatkan tingkat penangkapan ikan remaja dan tangkapan sampingan menjadi lebih tinggi.

Pada tahun 2021, Konsorsium menyadari bahwa sektor pukat cincin kurang terwakili sebagai pemangku kepentingan yang mengadvokasi peningkatan pengelolaan perikanan dibandingkan dengan sektor perikanan lainnya di Indonesia. Pada tahun 2023, anggota Konsorsium, Marine Change, mendukung pembentukan Asosiasi Purse Seine Indonesia (APSI) untuk memberikan suara bagi nelayan pukat cincin. APSI mengembangkan hubungan antara para pemangku kepentingan perikanan pukat cincin, pemerintah Indonesia, dan LSM serta mendukung kebijakan perikanan berkelanjutan. APSI mempromosikan transparansi di seluruh sektor, pengelolaan sumber daya secara kolaboratif, dan kepatuhan terhadap peraturan

PROYEK PERBAIKAN PERIKANAN TUNA PURSE SEINE

Salah satu pencapaian utama APSI hingga saat ini adalah membangun proyek perbaikan perikanan (FIP) untuk perikanan pukat cincin tuna di WPP 715 dan 716. FIP mengukur kemajuan menuju keberlanjutan perikanan dan bertujuan untuk mencapai sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) pada tahun 2028. Pada pra-penilaian bulan September 2023 menyoroti perlunya peningkatan dalam pengumpulan data perikanan, pencatatan interaksi dengan spesies yang terancam, punah, dan dilindungi (*Endangered, Threatened and Protected, ETP*), dan adanya pendaftaran rumpon.

nasional, regional, dan internasional serta praktik-praktik terbaik perikanan.

Asosiasi ini memberikan industri pukat cincin posisi dalam pertemuan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW yang dikelola pemerintah dan konsultasi dengan KKP. Dua belas perusahaan telah bergabung dengan APSI sejak pendiriannya. Hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa bagi industri dan merupakan indikasi potensi penerimaan industri terhadap implementasi tindakan pengelolaan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW.

MEMPROMOSIKAN PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA YANG BERKELANJUTAN

©Resonance

Menjadi tuan rumah bersama KPP untuk International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF) ke-7 di Bali pada bulan Mei 2023 merupakan kesempatan bagi Konsorsium Tuna mempromosikan peran dan keterlibatan industri perikanan dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, Konsorsium menyelenggarakan Indonesia Tuna Conference (ITC), yang dibuka oleh Menteri KKP yang menekankan nilai perikanan tuna bagi perekonomian Indonesia. Menteri juga menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan peluncuran Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW yang hampir mendatang.

ICTBF mengadakan sesi panel tentang energi terbarukan, teknologi perikanan tuna skala kecil, transparansi dan ketertelusuran, dan insentif pasar untuk perikanan tuna. Semua anggota Konsorsium dan lebih dari 200 peserta berpartisipasi dalam forum ini. Hasil utama dari ICTBF adalah penandatanganan Deklarasi Bali oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Ketua IPNLF, yang berkomitmen untuk melakukan empat tindakan demi masa depan yang berkelanjutan untuk perikanan tuna²⁰:

1. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan semua pekerja di seluruh rantai pasok
2. Meningkatkan pengakuan pasar terhadap perikanan tuna satu per satu
3. Mendukung investasi dalam inovasi dan teknologi modern yang ramah iklim
4. Mengikuti praktik-praktik terbaik global dalam penanganan dan pengolahan tuna.

Deklarasi ini merupakan pernyataan dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia, industri, dan LSM untuk berkolaborasi dengan nelayan skala kecil dalam mendukung industri tuna yang berkelanjutan. Penandatanganan Deklarasi ini mendapatkan atensi khusus di dunia maya melalui kisah dukungan pemerintah terhadap perikanan

tuna yang berkelanjutan yang ditandai dengan terpublikasinya lebih dari 50 artikel berita dan unggahan di media sosial.

PERIKANAN TUNA BERKELANJUTAN INDONESIA DI TINGKAT GLOBAL

Seiring dengan berjalannya proses pengembangan teknis dan konsultasi untuk Strategi Pemanfaatan di Indonesia, Konsorsium terhubung dengan para pemangku kepentingan industri tuna tingkat internasional untuk mempromosikan perikanan tuna Indonesia yang berkelanjutan di tingkat global.

Segera sebelum ITC pada tahun 2023 dan bersamaan dengan Regional KPBP yang diadakan di Bali, Konsorsium menyelenggarakan 'Tuna Talks', yang mempertemukan para ilmuwan dan praktisi perikanan untuk berbagi pengetahuan dan hasil penelitian. Semua anggota Konsorsium aktif dalam acara tersebut, berbagi penelitian dan pendekatan untuk mendorong pengembangan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW dan pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan dan adil. Dihadiri oleh akademisi dari 18 provinsi IAW dan WPP-nya, Tuna Talks membangun momentum untuk menerapkan strategi pemanfaatan dan mendorong diskusi tentang bagaimana pengelolaan perikanan tuna secara lebih baik. Tuna Talks tersedia secara *online* bagi para pengelola dan pemangku kepentingan perikanan.

Konsorsium memperluas upayanya di dunia internasional dengan mendukung KKP pada Paviliun Indonesia selama *Boston Seafood Expo* di Amerika Utara pada bulan Maret 2023. KKP memamerkan produk tuna Indonesia yang berkelanjutan bersama dengan 14 perusahaan Indonesia dan AP2HI. Kesempatan internasional lainnya untuk mempromosikan pencapaian perikanan tuna Indonesia adalah Kongres Perikanan Dunia (Maret 2024) dan Konferensi Tuna InfoFish di Bangkok (Mei 2024).

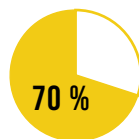
MENDORONG DAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN E-LOGBOOK DENGAN NELAYAN SKALA KECIL



Insentif paket HP dan pulsa untuk penggunaan eLogbook



Pelatihan cara guna aplikasi eLogbook untuk para nelayan



70% pengguna baru bertahan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

DUKUNGAN UTAMA

Mengujicobakan eLogbook dengan 54 nelayan skala kecil dan meninjau kembali data eLogbook dari 26 kapal perikanan tuna



LEBIH DARI 500 PERJALANAN TERCATAT

KETERLIBATAN NELAYAN SKALA KECIL DALAM PENGUMPULAN DATA

Memantau dan mengumpulkan data dari armada nelayan skala kecil di Indonesia menghadapi tantangan karena masyarakat yang berada di daerah terpencil serta infrastruktur komunikasi dan pengumpulan data yang belum memadai. Aplikasi buku catatan elektronik (*eLogbook*)²¹ yang dikembangkan oleh KKP merupakan solusi praktis bagi nelayan skala kecil (<5 GT) untuk mendokumentasikan lokasi penangkapan ikan, hasil tangkapan, tingkat upaya penangkapan, dan penggunaan kapal secara langsung. Namun, terdapat kendala dalam implementasi dan pemanfaatannya, yakni kapasitas nelayan yang terbatas dan kurangnya insentif.

Pada tahun 2023, Konsorsium MDPI dan FairTrade USA (FTUSA) memberikan insentif kepada nelayan di IAW untuk mengaktifkan dan menguji coba aplikasi eLogbook terbaru. eLogbook dipromosikan sebagai mekanisme untuk meningkatkan pengelolaan perikanan, keterlacakan, dan transparansi operasional penangkapan ikan, serta untuk mempermudah akses nelayan ke pasar produk kelautan yang berkelanjutan. FTUSA dan MDPI juga menyelenggarakan lokakarya audit dengan para nelayan pada Fairtrade Committee untuk mengembangkan praktik terbaik dalam penggunaan eLogbook dan pencatatan data.

Pengujian sebelumnya terhadap logbook elektronik telah menimbulkan kekhawatiran mengenai akurasi data yang dicatat oleh nelayan skala kecil. Untuk mengevaluasi masalah ini lebih dalam, Konsorsium YKAN melaksanakan analisis komparatif mengenai

“Tanpa data dari pemangku kepentingan, tidak akan ada Strategi Pemanfaatan. Strategi Pemanfaatan tidak akan berhasil tanpa kolaborasi.

— Dr. Fayakun Satria, Kepala PusRisKan



keakuratan pelaporan dengan menggunakan data tangkapan dari Januari hingga Juni 2022. Analisis ini melibatkan 26 kapal tuna yang menggunakan eLogbook selama enam bulan dan mencakup 156 perjalanan yang relevan dengan studi ini. Hasil analisis menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai akurasi data, dengan hampir tiga perempat dari perjalanan yang tercatat melaporkan total tangkapan di bawah standar. Meskipun demikian, identifikasi spesies oleh nelayan dari lebih dari separuh kapal tuna konsisten dengan catatan eLogbook. Temuan ini penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dan mitra pelaksana dalam peluncuran eLogbook pada kelompok nelayan, serta memberikan wawasan mengenai tingkat kepercayaan yang dapat diberikan kepada data yang diperoleh dari aplikasi tersebut.



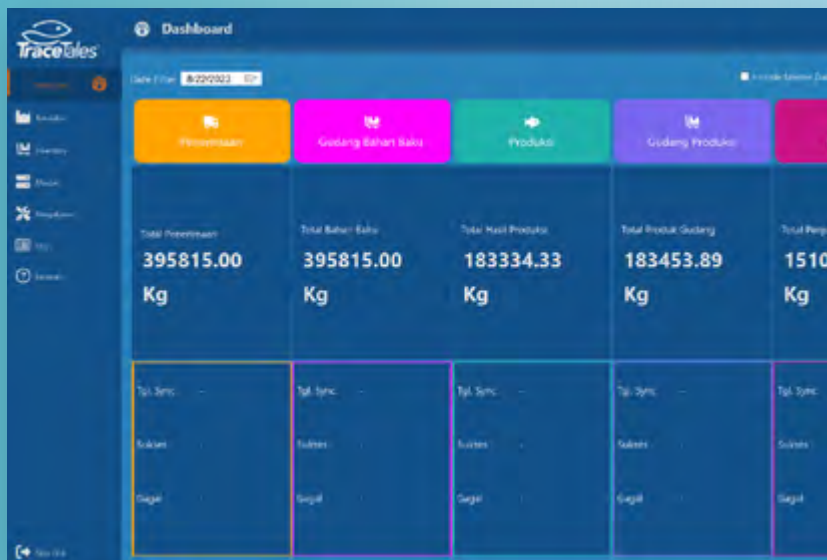
MENUMBUHKAN INOVASI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA

Membangun keterlacakan produk menjadi semakin penting bagi pembeli di pasar utama dan esensial untuk mencapai sertifikasi produk kelautan berkelanjutan. Teknologi penelusuran tangkapan dan dokumentasi elektronik (eCDT) dirancang untuk mengatasi tantangan dalam penelusuran hasil perikanan tangkap laut. Pengembangan sistem eCDT memerlukan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, asosiasi perikanan, pemasok, pengolah, akademisi, serta pengembang teknologi informasi. Untuk mendukung hal ini, Konsorsium telah membentuk First Movers Forum yang melibatkan pengembang eCDT, industri, pemerintah, dan LSM guna membangun kolaborasi, berbagi inovasi, dan mendukung adopsi eCDT dalam perikanan tuna Indonesia.

Anggota Konsorsium, YII, juga menyelidiki berbagai teknologi eCDT untuk mengidentifikasi sistem yang akan memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan perusahaan penangkapan ikan dengan skala yang berbeda. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem eCDT bergantung pada kebermanfaatan yang jelas bagi nelayan, dukungan kerangka kerja kebijakan yang memadai, dan kemitraan yang berkomitmen di antara para pemangku kepentingan untuk pengembangan serta implementasi teknologi tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan sistem ketertelusuran-nya, Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional singkatan STELINA²². Namun, diperlukan interoperabilitas lebih dengan sistem eCDT sektor swasta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam memenuhi sertifikasi dan ketertelusuran pembeli. Sistem ini bertujuan meningkatkan ketertelusuran produk perikanan, memenuhi persyaratan pasar impor, dan memperkuat daya saing tuna Indonesia di pasar internasional. STELINA juga akan membantu memerangi penangkapan ikan ilegal (IUU fishing) dengan mencatat data dari penangkapan hingga distribusi. Data ini akan memperkaya sistem pelaporan kementerian mengenai volume dan musim tangkapan spesies kunci. Anggota Konsorsium memberikan masukan kepada KKP tentang cara meningkatkan operabilitas STELINA dan memanfaatkan data untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik.

Dalam perkembangan terbaru yang menarik, anggota Konsorsium, MDPI, berhasil menguji integrasi sistem TraceTales dengan STELINA di dua perusahaan pengolahan ikan. TraceTales memungkinkan pelacakan inventaris secara elektronik sepanjang proses pemrosesan, dari penerimaan hingga pengiriman. Integrasi ini bertujuan meningkatkan pengarsipan data untuk ketertelusuran dan mempermudah pengiriman data perikanan oleh industri.



The screenshot shows the 'Jenis Ikan' (Fish Types) page in TraceTales. It displays two tables: 'Data di STELINA' and 'Data di Server'. Both tables have columns for ID, Kolom, Nama, Kode FAD, Nama Inggris, Nama Latin, and Detail.

ID	Kolom	Nama	Kode FAD	Nama Inggris	Nama Latin	Detail
1	Ulat	Kan. ulang la...		CASTLENAUS JAWFISH	Z76444	
2	Triggerfish	Kembang-kang...	AJS	STARRY TRIGGERFISH	Ablactes stellatus	
3	Wangfish	Berang-katuk...		COCKATOD WANGFISH	Ablactes tamariscus	
4	Sponge	Spons scanti...		ACANTHELLA CAVERNOSA SP.	AcantHELLA cavernosa	
5	Damudfish	Betek spiny...	AE	SPINY CHROMIS	AcantHODONIS polyaca...	
6	Walrus	Walrus	WATU	WAHOO	AcantHODONIS solandri...	
7	Surgeon fish	Unknown	NTM	CHOCOLATE TALKING CATFISH	AcantHODONIS spinosus...	
8	Seabream	Katambal		BLACK BREAM, GOLDSEK SEAB.	AcantHOPAGRA pacificus	
9	Seaweed	Rumput laut...	KH	RED ALGA	AcantHOPHORA speciosa	
10	Okuni	Kayu laut...		NORTHERN SPINCH OYSTER	AcantHOPHORA geminata	
11	Surgeon fish	Botana		WHITEN SURGEONFISH	AcantHURUS albigatoralis	
12	Surgeon fish	Botana kinas...	AOB	OCEAN SURGEON BARBER SU...	AcantHURUS bahianus	
13	Surgeon fish	Botana		PINKFIN SURGEONFISH	AcantHURUS graminoptilus	
14	Surgeon fish	Botana	DGW	ELONGATE SURGEONFISH	AcantHURUS mela	
15	Seabream	Katambal		BLACK BREAM, GOLDSEK SEAB.	AcantHURUS pacificus	

Gambar 5. Aplikasi ingetras TraceTales dengan STELINA.



TEMA 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: MENINGKATKAN KAPASITAS, MANFAAT, DAN KETAHANAN NELAYAN



HAL-HAL PENTING:

- ➔ Membimbing lebih dari 100 'champion' (pejuang) perikanan dari Perairan Kepulauan Indonesia (IAW), dimana lebih dari setengahnya adalah perempuan yang berperan sebagai katalisator perubahan positif di masyarakat dan sektor perikanan.
- ➔ Mendukung pelatihan bagi nelayan dan pemasok mengenai rantai dingin dan penanganan ikan untuk meningkatkan kualitas tangkapan dan mengurangi kerugian pasca panen.
- ➔ Memberikan kerangka kerja literasi keuangan yang disesuaikan dan inovatif untuk membangun ketahanan mata pencaharian rumah tangga nelayan skala kecil.
- ➔ Mendorong keberhasilan pendaftaran alat bantu pengumpul ikan (rumpon) kedua secara nasional, yang menjadi preseden bagi pengelolaan rumpon yang lebih komprehensif dan praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN MASYARAKAT

Mencapai pengelolaan perikanan berkelanjutan lebih kepada mengelola para pemangku kepentingan perikanan (nelayan, pengumpul, pengolah) daripada mengelola sumber perikanan sendiri secara langsung. Transisi menuju pengelolaan perikanan berkelanjutan membutuhkan individu dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah. Kerangka kerja dan instrumen pemerintah untuk pengelolaan hanya akan berhasil jika pengguna sumber daya memahami tujuan dan manfaat sosial-ekonomi yang harus disediakan.

Dengan sektor perikanan yang didominasi oleh nelayan skala kecil, termasuk 137.340 kapal penangkap ikan tuna di Perairan Kepulauan Indonesia (IAW)²³, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadapi tantangan dalam hal kepraktisan dan skala dalam menerjemahkan kebijakan peningkatan perikanan kepada nelayan. Namun, pencapaian tujuan kebijakan ini untuk memberi manfaat kepada para pemangku kepentingan di tingkat masyarakat sangat penting untuk memerangi kerentanan rumah tangga nelayan skala kecil terhadap tingkat kemiskinan yang tinggi, penurunan kesehatan ekosistem, dan dampak perubahan iklim.

Konsorsium mendukung para pemangku kepentingan pemerintah di tingkat lokal dengan bekerja untuk membangun pemahaman masyarakat nelayan tentang kebijakan berharap meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Pada saat yang sama, Konsorsium mengangkat suara nelayan skala kecil dalam pengelolaan perikanan dan membangun kapasitas

mereka untuk beroperasi demi keuntungan ekonomi dalam kerangka kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan KKP.

Pengalaman anggota Konsorsium dalam mengembangkan kapasitas nelayan dan koperasi perikanan di tingkat lokal memberikan informasi yang sangat berharga dari tingkat bawah ke atas. Dukungan pengembangan kapasitas anggota Konsorsium dapat dibagi menjadi tiga bidang yang berbeda:

1. Kapasitas untuk beroperasi di laut
2. Kapasitas untuk penanganan hasil tangkapan
3. Kapasitas bisnis.

MENDORONG PENGHIDUPAN NELAYAN YANG BERKELANJUTAN



DUKUNGAN UTAMA

Melaksanakan pelatihan berfokus praktik perikanan yang berkelanjutan untuk 'champion' (pejuang) nelayan



105 'CHAMPION' NELAYAN
54 % PEREMPUAN



MEMBIMBING NELAYAN UNTUK MENJADI CHAMPION PERUBAHAN

Anggota Konsorsium, MDPI, mengidentifikasi dan mendampingi 105 'champion' perikanan dari berbagai lokasi, 54 persen di antaranya adalah perempuan, sebagai katalisator perubahan positif di komunitas mereka dan sektor perikanan. Para Champion dilatih dalam empat bidang utama:

1. **Pentingnya data untuk pengelolaan perikanan** — untuk membantu mereka memotivasi nelayan mencatat perjalanan penangkapan ikan dan data tangkapan.
2. **Berbicara di depan umum dan kepemimpinan** — untuk membangun kepercayaan diri mereka dalam mempresentasikan di depan masyarakat dan dalam lingkungan formal, seperti KPBP.
3. **Pengelolaan perikanan berkelanjutan** — untuk menjadi penyebar informasi dan praktik-praktik berkelanjutan ke seluruh komunitas nelayan mereka.
4. **Pelatihan sosial media** — untuk membangun keterampilan menggaungkan suara mereka.

“ Saya sangat senang mengikuti acara bersih pantai. Karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya sampah laut, terutama bagi mata pencaharian kami.

— Sahidah, masyarakat pesisir dari Bone

Pada Hari Perikanan Sedunia 2023, MDPI dan para pejuang perikanan mempromosikan perikanan yang legal dan teregulasi serta pengelolaan stok ikan yang berkelanjutan kepada hampir 800 anggota masyarakat pesisir di delapan provinsi. Diskusi dengan para pemangku kepentingan perikanan menekankan betapa pentingnya data nelayan untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan mendorong nelayan untuk mencatat rincian setiap perjalanan penangkapan ikan.

Diskusi lainnya berfokus pada praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan dampak negatif dari limbah yang dibuang ke lingkungan laut terhadap stok ikan, kualitas ikan, dan kesehatan masyarakat. Para nelayan mengadakan acara bersih-bersih pantai sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga lingkungan dan bekerja sama untuk perikanan yang berkelanjutan dan mata pencaharian bagi masyarakat.



KAPASITAS NELAYAN UNTUK BEROPERASI DI LAUT

MENGATASI HAMBATAN DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERIKANAN

Tingginya tingkat ketidakpatuhan kelompok nelayan Indonesia terhadap peraturan pemerintah tentang lisensi dan perizinan sering kali disebabkan oleh proses administrasi yang rumit dan memberatkan nelayan. Tantangan implementasi kebijakan di lokasi-lokasi terpencil di Indonesia bagian timur adalah kurangnya infrastruktur pendukung, sumber daya manusia dan kapasitas yang terbatas, serta pemahaman yang kurang baik tentang tujuan dan mekanisme instrumen kebijakan.

Anggota Konsorsium bekerja untuk membangun pemahaman di antara masyarakat nelayan tentang bagaimana lisensi dan perizinan mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adil, serta membantu nelayan menavigasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kepatuhan. Anggota Konsorsium, MDPI, bekerja sama dengan unit manajemen pelabuhan di lima lokasi untuk mendukung nelayan mendaftarkan kapal mereka dan bekerja sama dengan staf penyuluh perikanan pemerintah di enam provinsi untuk memfasilitasi sertifikasi nelayan kecil dalam hal keselamatan di laut, navigasi, pertolongan pertama, dan operasi penangkapan ikan.

Dalam upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap perizinan rumpon dan dalam persiapan pembatasan rumpon di bawah Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW, anggota Konsorsium, MDPI, berkolaborasi dengan Dinas Perikanan di tingkat kabupaten untuk meningkatkan kesadaran nelayan tentang persyaratan dan proses untuk

mendapatkan Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR). Untuk mendapatkan SIPR nelayan harus menjadi anggota koperasi, memiliki kapal penangkap ikan, dan memiliki izin penangkapan ikan. Meskipun proses aplikasi dilakukan secara *online*, proses ini dapat memakan waktu hingga tujuh bulan untuk menyelesaikan aplikasi, dan *platform online* menjadi penghambat bagi nelayan yang kurang berkembang dalam hal literasi digital.

Anggota Konsorsium, MDPI, telah proaktif dalam memajukan pendaftaran rumpon, mengorganisir forum, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, menyelenggarakan *webinar*, dan melibatkan pemangku kepentingan pemerintah dalam mencari solusi untuk mengelola dan mendaftarkan rumpon di tingkat provinsi dan regional. Hal ini, berujung pada keberhasilan registrasi rumpon yang kedua di Indonesia, dimana proses multi-pemangku kepentingan ini menghasilkan banyak pembelajaran tentang proses registrasi yang dapat dibagikan kepada operator rumpon lainnya. Izin rumpon kedua ini adalah untuk operasi pukat cincin, yang menunjukkan bahwa registrasi dapat dilakukan oleh semua segmen sektor perikanan, dan menandakan adanya peluang untuk pengelolaan rumpon yang lebih komprehensif untuk mempromosikan praktik perikanan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

MENDUKUNG NELAYAN SKALA KECIL MENDAPATKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PERIZINAN KAPAL



Sertifikasi kompetensi
kualitas ikan



Pas Kecil dan
Tanda Daftar Kapal
Perikanan

DUKUNGAN UTAMA

Bekerjasama dengan petugas pelabuhan dan perikanan dalam mendukung kepatuhan nelayan skala kecil



593 NELAYAN DISERTIFIKASI

729 KAPAL TERDAFTAR

KAPASITAS NELAYAN DALAM PENANGANAN HASIL TANGKAPAN

MEMBANGUN KAPASITAS TEKNIS

Didorong oleh tuntutan pasar internasional akan bukti bahwa produk perikanan memenuhi standar keamanan pangan, dan keinginan untuk meningkatkan kualitas ekspor ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)²⁴ bahwa awak kapal penangkap ikan harus memiliki sertifikasi penanganan ikan yang baik. Mewujud tujuan ini, anggota Konsorsium mendukung melalui sesi pelatihan bagi nelayan dan pemasok rantai dingin dan penanganan ikan untuk meningkatkan kualitas tangkapan dan mengurangi kerugian pasca panen. Pelatihan Cara Pengolahan dan Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dapat ditargetkan untuk nelayan dan praktik penanganan ikan di atas kapal untuk menjaga kualitas ikan dan nilai pasar, atau untuk pemasok dan pemasok *mini-plant*, dengan fokus pada pemenuhan standar keamanan pangan dan kebersihan sebelum ikan mencapai pabrik pengolahan yang lebih besar. Secara keseluruhan, 523 nelayan, pengumpul ikan, dan pemasok dilatih dalam CPIB melalui inisiatif anggota Konsorsium (MDPI dan YII) pada Fase Dua.

Di Maluku, anggota Konsorsium, YII, memfasilitasi Tim Instruktur dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon untuk memberikan pelatihan CPIB kepada para nelayan dan pengepul tuna. Kolaborasi ini berhasil memberikan gambaran rinci kepada

“ Saya jadi sadar betapa pentingnya menjaga kualitas ikan di lapangan.

— Sugen Kapoa, Anggota Asosiasi Nelayan Latamiha

para peserta tentang teknik penanganan ikan dan metode yang aman dan higienis di atas kapal, di tempat pendaratan, dan di tempat penyimpanan dingin. Setelah pelatihan, 80 nelayan dan pengepul ikan berkesempatan untuk menerapkan pelajaran dalam sesi praktik sebelum menyelesaikan tes untuk mendapatkan sertifikasi.

MEMBANGUN PENGETAHUAN

Dalam upaya meningkatkan pemahaman nelayan tuna tentang prosedur pengolahan hasil tangkapan bersertifikat FairTrade, anggota Konsorsium, MDPI, mengundang nelayan pancing ulur mengunjungi fasilitas pengolahan ikan di Buru, Maluku. Selama kunjungan, para nelayan mempelajari standar kebersihan dan sistem penelusuran yang diperlukan untuk pelabelan ramah lingkungan. Kepala fasilitas pengolahan menyambut baik minat para nelayan dalam mempelajari teknik penanganan ikan untuk mengawetkan hasil tangkapan mereka. Para nelayan merasa puas melihat hasil tangkapan mereka ditangani dengan baik dan terinspirasi menerapkan teknik penanganan terbaik di laut.



KAPASITAS NELAYAN DALAM BERBISNES

KKP mendorong profesionalisasi dan modernisasi dari koperasi perikanan sebagai mekanisme pengentasan kemiskinan bagi masyarakat pesisir. Sejalan dengan arahan ini, anggota Konsorsium mendukung koperasi perikanan untuk meningkatkan literasi keuangan anggota dan profesionalisme organisasi.

Anggota Konsorsium, FairTrade USA (FTUSA), mewawancarai nelayan bersertifikat di Seram dan Buru tentang pengalaman mereka dengan dinamika kelompok dan mekanisme yang paling efektif untuk membangun kelompok yang koheren.

Pembahasan pembentukan dan pengoperasian koperasi terfokus pada prinsip-prinsip FTUSA, antara lain seperti budaya pertemuan, dokumentasi, transparansi, akuntabilitas, dan literasi keuangan. FTUSA dan MDPI berkolaborasi untuk melibatkan nelayan dalam Komite Fairtrade untuk mengembangkan pendekatan dan praktik terbaik bagi keterlibatan masyarakat, terutama untuk koperasi perikanan yang memerlukan akses terhadap pendanaan eksternal dan memiliki dukungan LSM yang terbatas.

MEMBANGUN LITERASI KEUANGAN RUMAH TANGGA YANG MENDASAR

Anggota Konsorsium, MDPI, menerapkan alat yang disesuaikan dan inovatif untuk membangun ketahanan mata pencaharian rumah tangga nelayan skala kecil. Melalui hasil penilaian yang dilakukan nelayan tentang kebutuhan jenis pelatihan apa yang paling bermanfaat bagi nelayan dalam meningkatkan kondisi ekonomi mereka, pada

tahun 2021, MDPI mengembangkan kerangka kerja literasi keuangan yang berfokus pada peningkatan kapasitas nelayan dalam mengelola uang dan meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan ekonomi pesisir.

Pada intinya, program literasi keuangan ini dimaksudkan untuk membangun ketahanan nelayan terhadap musim ikan dan kejadian-kejadian tak terduga seperti bencana alam, sakit, dan kecelakaan di laut melalui peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan. MDPI mengembangkan paket pelatihan yang menyenangkan dan menarik yang berpusat pada permainan simulasi yang disebut 'Si Keong Nelayan' yang dirancang khusus untuk masyarakat pesisir. Pelatihan diberikan kepada 1.140 anggota dari 52 asosiasi nelayan di lokasi sekitar IAW di lima provinsi, termasuk nelayan, istri nelayan, dan pemuda. Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan mata pencaharian di pesisir, khususnya di sektor perikanan. Setelah mengikuti pelatihan, rumah tangga pesisir memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan dan meningkatkan kapasitas untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dengan memprioritaskan kebutuhan mereka.

Keberhasilan pelatihan manajemen keuangan tahap pertama menginspirasi anggota Konsorsium, MDPI, untuk menerapkan prinsip yang sama dalam mengembangkan pengembangan kapasitas literasi keuangan tahap kedua pada akhir tahun 2022. Pelatihan tahap kedua menjangkau 250 rumah tangga nelayan, dengan menggunakan permainan yang disebut "Si Kompas Nelayan". Permainan ini



©FTUSA

mengajarkan peserta untuk memprioritaskan kebutuhan mereka dan membuat rencana keuangan untuk mencapai target mereka melalui pengembangan bisnis dan investasi. Peningkatan literasi keuangan di tingkat rumah tangga diharapkan dapat membantu nelayan mengelola keuangan mereka dengan percaya diri, dan dalam jangka panjang, menghasilkan mata pencaharian yang lebih baik dan berkelanjutan. Nelayan melaporkan bahwa pelatihan ini membantu mereka untuk lebih memahami bagaimana memprioritaskan kebutuhan mereka dan menabung untuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Selama kedua tahap pengembangan kapasitas literasi keuangan, anggota Konsorsium, MDPI, telah melampaui target yang direncanakan dan keberhasilan program ini telah menghasilkan minat yang kuat dari LSM lain dan dinas perikanan pemerintah. MDPI telah menanggapi hal ini dengan mengembangkan video tutorial literasi keuangan bagi para pemangku kepentingan yang tertarik untuk berkolaborasi dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat di tempat mereka bekerja. Rencana pelatihan literasi keuangan tahap ketiga sedang dikembangkan, dan kemungkinan besar akan berfokus pada bagaimana mengakses pembiayaan lembaga keuangan formal dan informal. Dengan menawarkan 'blok bangunan' pelatihan progresif kepada masyarakat pesisir, MDPI mempertahankan minat nelayan dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan dampaknya di masyarakat.

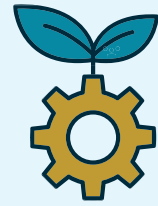
“ Kami memiliki kejelasan dalam mencapai target pembelian mesin kapal untuk tahun ke depan. Dalam sebulan, kami harus menyisihkan setidaknya 500.000 rupiah.

— Pak Badrun dan istrinya, keluarga nelayan di Lombok Timur.

MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KOPERASI NELAYAN

Keberhasilan koperasi nelayan membutuhkan kompetensi dalam organisasi dan kepemimpinan. Namun, banyak koperasi pesisir tidak memiliki keterampilan untuk mencapai kesuksesan dan memiliki pendidikan formal yang terbatas untuk diterapkan pada usaha bisnis mereka. Anggota Konsorsium, MDPI, bertujuan untuk memperkuat kemampuan individu dalam menjalankan koperasi yang dipimpin oleh nelayan dan mempersiapkan mereka untuk mencapai kesuksesan kelembagaan. Sesi pelatihan manajemen keuangan untuk anggota koperasi yang berfokus pada pembukuan dan penggunaan aplikasi seluler, pelaporan keuangan, penganggaran, dan manajemen organisasi yang menjadi kunci untuk mengembangkan kapasitas koperasi. Profesionalisme organisasi juga dibahas dalam pelatihan tentang persiapan rapat anggota tahunan, menyusun laporan manajemen dan pengawasan, serta mengevaluasi dan membuat rencana kerja tahunan.

TEMA 4. AKSI KOLEKTIF: MEMBANGUN KONSORSIUM TUNA YANG EFEKTIF



HAL-HAL PENTING:

- ➔ Memberikan dukungan koordinasi yang penting untuk mempercepat upaya kolaboratif dalam menyempurnakan dan mengimplementasikan Strategi Pemanfaatan Tuna di perairan kepulauan Indonesia.
- ➔ Memperdalam kolaborasi antara Konsorsium Tuna dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat kerja Konsorsium dan memajukan kebijakan dan program perikanan tuna yang berkelanjutan.
- ➔ Mengadvokasi perspektif nelayan dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan di tingkat nasional dan memperkuat suara sektor perikanan skala kecil.

KEKUATAN KONSORSIUM

Dalam dua setengah tahun terakhir, Konsorsium telah memperkuat dampaknya dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran yang sama, memperluas basis mitranya di KKP, dan mengintensifkan dukungan teknis untuk meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan data perikanan.

Konsorsium ini sangat bernilai bagi anggotanya serta pemangku kepentingan dari industri, komunitas ilmiah, dan masyarakat umum. Melalui pendekatan kolaboratif internal dan eksternal, terutama dalam membantu finalisasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW, Konsorsium memastikan bahwa berbagai perspektif diper-timbangkan dan diintegrasikan ke dalam strategi pengelolaan. Dengan Resonance sebagai pusat koordinasi, Konsorsium mendorong implementasi bersama dan mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mendukung pengembangan dan promosi keterlibatan pemangku kepentingan dalam Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW.

Konsorsium berkomitmen untuk terus bekerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kondisi yang mendukung implementasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW serta langkah-langkah pengelolaan utama. Konsorsium juga akan memperluas cakupannya untuk membangun ketahanan jangka panjang dalam rantai pasokan dan masyarakat, termasuk mengidentifikasi risiko

iklim serta mengintegrasikan tindakan ketahanan untuk memastikan keberlanjutan dan adaptabilitas perikanan dalam jangka panjang.





©RESONANCE

Selama dua setengah tahun terakhir, kolaborasi antara Konsorsium dan Pemerintah Indonesia telah berkembang. Awalnya, Konsorsium bekerja sama dengan KKP, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Pada fase kedua, Konsorsium memperdalam keterlibatan dengan DJPT dan kolaborasinya diperluas dengan departemen terkait lainnya di KKP, berkat dukungan koordinasi yang diberikan oleh Resonance. Keterlibatan ini sangat penting untuk kemajuan pekerjaan Konsorsium, yang memerlukan kolaborasi erat dengan departemen atau lembaga tertentu di tingkat nasional dan implementasi di tingkat provinsi. Beberapa hubungan dan keterlibatan utama yang mendapat manfaat dari kemitraan strategis dirangkum di bawah ini.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan: Konsorsium mendukung Departemen Pemasaran Perikanan untuk mencapai berbagai pencapaian, seperti mendeklarasikan 2024 sebagai Tahun Tuna Indonesia pada perayaan Hari Ikan Nasional pada November 2023 dan mempromosikan Indonesian Sustainable Tuna di Boston Seafood Expo North America pada 10-12 Maret 2024, dengan partisipasi dari 14 perusahaan Indonesia, termasuk anggota Asosiasi Pole & Line and Handline Indonesia (AP2HI).

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP):

Badan ini secara aktif berpartisipasi dalam sesi pengembangan kapasitas dan pelatihan yang dilaksanakan oleh anggota Konsorsium. Anggota Konsorsium, MDPI, sedang mengerjakan keterlibatan formal dengan BPPSDMKP untuk memberikan sertifikasi dan peluang beasiswa bagi para nelayan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP):

Anggota Konsorsium terlibat dalam berbagai kegiatan sistem pengawasan, termasuk penerapan Sistem Pemantauan Kapal (VMS) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, 714, dan 715 sebagai persiapan untuk implementasi Strategi Pemanfaatan Tuna IAW. Ke depan, anggota Konsorsium YKAN akan memfokuskan upayanya pada penyebaran pemantauan praktis ke 18 provinsi di IAW.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN):

Penasihat dan anggota Konsorsium berkontribusi dan memfasilitasi finalisasi aturan kontrol panen. Selama proses pengembangan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW, anggota Konsorsium dan KKP mempresentasikan temuan penelitian untuk didiskusikan dengan para pakar ilmiah BRIN.



MEMPERTAHANKAN MOMENTUM PENGELOLAAN TUNA BERKELANJUTAN DI IAW PADA TAHUN-TAHUN MENDATANG

Finalisasi dan peluncuran dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW merupakan langkah besar menuju pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan di Indonesia.

Di tingkat regional, Pemerintah Indonesia layak mendapatkan pengakuan sebagai negara berkembang pesisir pertama yang mempresentasikan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di forum *Western Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*.

Dalam beberapa tahun ke depan, operasionalisasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW sebagai alat pengelolaan perikanan yang responsif diperkirakan akan memberikan dampak yang berarti bagi stok ikan tuna dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan di IAW.

Rintangan utama dalam mengoperasionalkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW adalah mendapatkan dukungan untuk tindakan pengelolaan di antara pemerintah provinsi dan daerah serta 10.000 nelayan di provinsi-provinsi besar di IAW. Tantangan selanjutnya adalah merancang dan melaksanakan tindakan pengelolaan untuk mengurangi tangkapan sebesar 10 persen di area yang diidentifikasi selama tiga tahun ke depan, menegakkan penutupan spasial, serta memperluas pendaftaran dan pengelolaan rumpon. Tindakan pengelolaan inti, seperti menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan per KKP atau membatasi penggunaan rumpon, akan membutuhkan fasilitasi yang ekstensif dengan nelayan skala kecil agar tercapai keberhasilannya. KKP menyadari kebutuhan penting untuk kolaborasi berkelanjutan antara lembaga pemerintah, pakar ilmiah, LSM, dan asosiasi nelayan untuk mencapai

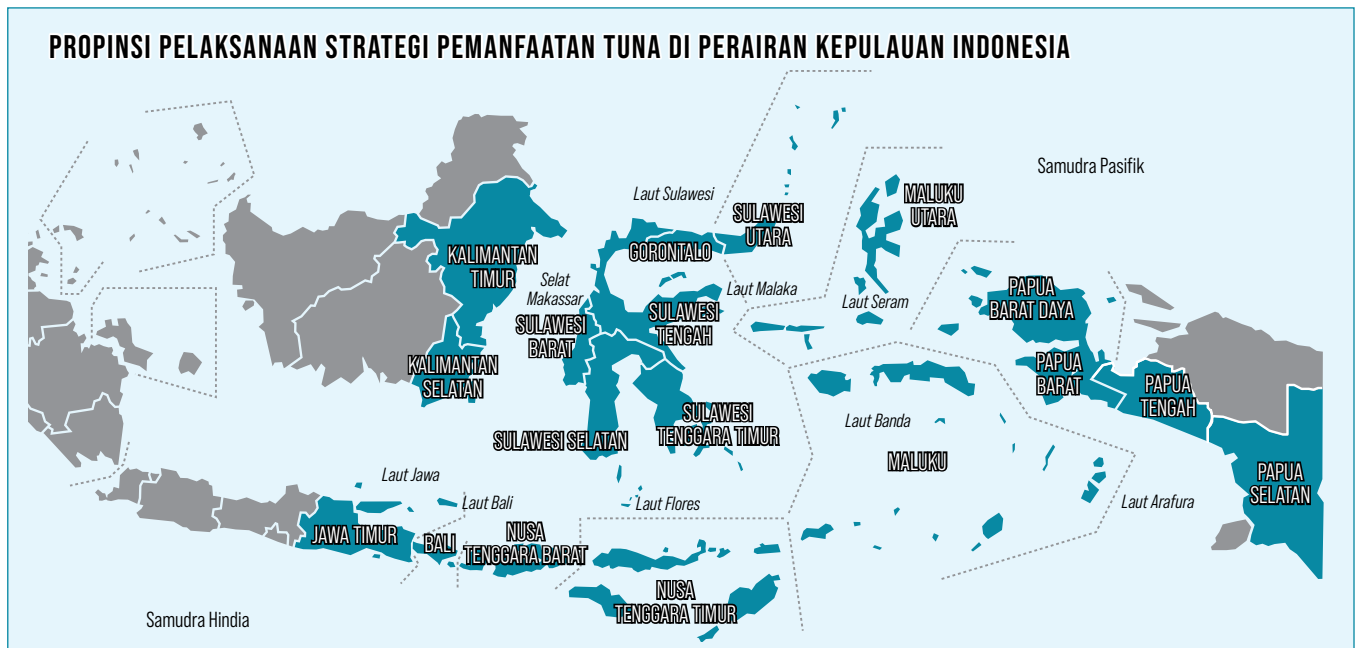
“ **Strategi Pemanfaatan Perikanan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan tuna di Perairan Kepulauan Indonesia di tahun-tahun mendatang.**

— Dr. Toni Ruchimat, Penasihat Kebijakan Konsorsium Tuna Indonesia

keterlibatan pemangku kepentingan dan dukungan dalam proses pengelolaan ini. Pendefinisian peran di antara para pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah dalam setiap langkah pengelolaan sudah berjalan dan sedang dipertimbangkan bersamaan dengan penyelesaian Rencana Aksi Tuna Nasional untuk memandu pengelolaan tuna yang berkelanjutan hingga tahun 2029.

Ke depan, ada kebutuhan mendesak untuk melembagakan pengumpulan data perikanan dan penerapannya di bawah Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW serta mengidentifikasi sumber daya keuangan dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan penting ini di masa depan. Pekerjaan yang telah dicapai dalam menentukan kumpulan data dan parameter untuk menginformasikan keputusan pengelolaan perikanan tuna telah memberi KKP cetak biru untuk pengumpulan data yang akan perlu disediakan sumber daya untuk melayani pengelolaan perikanan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Kesempatan juga terbuka untuk mengaktifkan peran akademisi Indonesia dalam menyediakan penelitian penting (berdasarkan data yang dikumpulkan) kepada KKP untuk menginformasikan keputusan manajemen dan kebijakan.

Secara keseluruhan, pengalaman mengembangkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di IAW menunjukkan bahwa dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang kuat dan pendekatan yang terkoordinasi terhadap kebijakan perikanan, pengambilan keputusan perikanan yang responsif



Gambar 6. 18 provinsi implementasi untuk Strategi Pemanfaatan Tuna di Perairan Kepulauan Indonesia.

berbasis data dan berbasis bukti dapat dicapai di Indonesia. Implementasi Strategi Pemanfaatan di tahun-tahun mendatang memberikan peluang bagi KKP untuk mempertahankan komitmen dalam mengelola sumber daya tuna secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan mata pencaharian mereka di masa depan.

DUKUNGAN KONSORSIUM TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PEMANFAATAN PERIKANAN TUNA DI IAW (FASE 3)

Selama Fase Tiga, Konsorsium, yang dipimpin oleh Resonance, akan terus mendukung KKP dalam implementasi Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna di Perairan Kepulauan Indonesia (IAW). Ini mencakup manajemen efektif, pemantauan, konsultasi ilmiah, dan pelibatan pemangku kepentingan lokal dan internasional. Konsorsium akan menyelenggarakan pertemuan dan lokakarya untuk meningkatkan koordinasi dan melibatkan pemangku kepentingan. Selain itu, Konsorsium akan memfasilitasi pelatihan, forum, dan pengumpulan data untuk mendukung pengelolaan berbasis bukti, mengumpulkan data sosial ekonomi, dan menghasilkan makalah teknis tentang tindakan pengelolaan utama. Konsorsium juga akan bekerja dengan KKP untuk mengoperasikan sistem pengelolaan kelembagaan dalam mekanisme Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), termasuk pengembangan rencana aksi dan rapat koordinasi.

Dalam rangka memperluas cakupan kerja melibatkan industri dari Tahap Dua, Konsorsium

berencana untuk melanjutkan upayanya dalam mengadvokasi praktik-praktik tuna yang berkelanjutan di Indonesia dan meningkatkan akses pasar bagi industri dan masyarakat nelayan. Inisiatif ini akan melibatkan pengujian dan mendorong adopsi sistem penelusuran hasil tangkapan dan dokumentasi elektronik (eCDT), melatih para pemangku kepentingan industri dalam memenuhi persyaratan pasar dan praktik ketenagakerjaan, serta menilai risiko iklim dan sosio-ekonomi. Menanggapi kekawatiran yang berkembang seputar perubahan iklim, Konsorsium akan mempertimbangkan risiko masyarakat dan rantai pasokan, menentukan berbagai skenario dampak iklim dan kerentanan, dan mengkomunikasikan risiko iklim dan sosial serta tindakan ketahanan kepada para pemangku kepentingan industri yang relevan, entitas pemerintah, dan pemangku kepentingan masyarakat.

Pada Fase Ketiga, Konsorsium akan memperdalam dukungannya kepada masyarakat dan nelayan untuk terlibat dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan, mengakses pasar, dan membangun mata pencaharian yang tangguh. Hal ini termasuk meningkatkan kesadaran, membangun kapasitas pasar, mempromosikan mata pencaharian yang tangguh, pelatihan literasi keuangan, dan pembentukan dan pemeliharaan koperasi nelayan, serta meningkatkan akses ke sumber daya dan dukungan teknis untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Melalui promosi mata pencaharian yang tangguh dan memastikan perikanan tuna yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia, Konsorsium bertujuan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan konservasi sambil menginspirasi semua pihak yang terlibat.

CATATAN

- 1 MDPI, 2023a, Pew Charitable Trusts, 2020.
- 2 ANTARA, 2024.
- 3 KKP, 2018
- 4 Berdasarkan SK no. 47/KEP-DJ PT/2017.
- 5 Indonesia adalah anggota aktif:
 - (1) Komisi Tuna Samudera Hindia (Indian Ocean Tuna Commission—IOTC) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007;
 - (2) Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna—CCSBT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007; dan
 - (3) Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah (Western and Central Pacific Fisheries Commission—WCPFC) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013.
- 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 107 tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT) yang diperbaharui oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 121 tahun 2021.
- 7 Wawancara Bapak Toni Rachimat.
- 8 In addition to WCPFC, Indonesia has ratified the following regional cooperation agreements:
 - (1) Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia (IOTC) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007;
 - (2) Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (CCSBT) through Presidential Decree No. 109 of 2007.
 - (3) Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sedia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2009. (KKP, 2012).
- 9 Dua jenis titik referensi utama digunakan untuk membandingkan status sistem pengelolaan perikanan dengan keadaan yang diinginkan (atau tidak diinginkan): titik referensi batas (limit reference point—LRP, atau Blim dan Flim), dan titik referensi target (target reference point—TRP, atau BTARGET dan FTARGET), yang biasanya didasarkan pada tingkat mortalitas penangkapan ikan (berbasis F) atau kelimpahan populasi (berbasis B).
- 10 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 121 Tahun 2021.
- 11 Hoshino, 2024.
- 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 (Alat Pengangkapan Ikan) pasal 15.
- 13 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2022 tentang Alokasi Rumpon Pada Jalur Penangkapan Ikan III di t WPPNRI.
- 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 (Standar Kegiatan Usaha Perikanan).
- 15 Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- 16 USAID Ber-ikan adalah proyek lima tahun yang membantu Indonesia melindungi keanekaragaman hayati lautnya dengan mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adil.
- 17 Kooij, M., et. al. 2023.
- 18 Proyek Peningkatan Perikanan (Fishery Improvement Project—FIP) merupakan upaya multi-pihak untuk meningkatkan praktik dan pengelolaan penangkapan ikan melalui inisiatif industri untuk memenuhi permintaan pasar.
- 19 Pet, J. S., et. al., 2022.
- 20 Satu-per-satu (One-by-one) adalah istilah kolektif yang mencakup metode penangkapan ikan dengan pancing dan tali, pancing ulur, dan pancing troll. Cara penangkapan ikan ini sangat selektif dan berkelanjutan secara lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, serta mendukung ekonomi lokal. <https://ipnlf.org/what-is-one-by-one-tuna/>.
- 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan menyediakan sarana bagi nelayan skala kecil untuk menggunakan eLogbook sederhana guna melaporkan hasil tangkapan ikan.
- 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 29 Tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA).
- 23 Data 2022, Bapak Toni Rachimat.
- 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik.

BIBLIOGRAFI

- Annemarie, F. L., 2023. World Fisheries Day 2023: Empowering Fisheries Champions for Responsible Fisheries. MDPI.
- Anonymous, 2018. Framework for harvest strategies for tropical tuna in archipelagic waters of Indonesia. Fourteenth Regular Session of the Western and Central Pacific Fisheries Commission Scientific Committee, 8–16 August 2018. WCPFC-SC14-2018/MI-IP-06.
- Anonymous, 2018. tRFMO-MSE working group glossary.
- ANTARA, 2024. Introducing Indonesian tuna to compete in global markets. Rahmad Nasution (Ed.).
- Aprian, M., Adrianto, L., Boer, M., Kurniawan, F., 2023. Re-thinking Indonesian marine fisheries quota-based policy: A qualitative network of stakeholder perception at Fisheries Management Area 718, Ocean & Coastal Management, Volume 243, 106766, ISSN 0964-5691.
- Cressey, D., 2014. Use of 'fish aggregating devices' could be unsustainable. Nature.
- Davies, T. K., Mees, C. C., and Milner-Gulland, E., 2014. The past, present and future use of drifting fish aggregating devices (FADs) in the Indian Ocean. Marine Policy, 45, 163-170.
- Depari, R. D. S., Darmawan, Nugroho, T., 2022. Compliance of FADs Installation with the Regulations From The Ministry Of Maritime Affairs And Fisheries At Pelabuhanratu. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 13 No. 1 Mei 2022: 1-12.
- Dharmawan, A., Prameswari, M.A. I., 2023. Three Essential Steps for Cooperatives to Thrive in the Modern World.
- FAO, 2023. FishStatJ Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, Rome, Italy.
- Fishery Progress, 2024. Indonesia North Sulawesi skipjack and yellowfin tuna - purse seine.
- Goethel, D.R., Lucey, S.M., Berger, A.M., Gaichas, S.K., Karp, M.A., Lynch, P.D., Walter, J.F., Deroba, J.J., Miller, S., Wilberg, M.J., 2018. Closing the feedback loop: on stakeholder participation in management strategy evaluation. Pressure: addressing fisheries challenges with management strategy evaluation 1, 1895–1913.
- Goethel, D.R., Lucey, S.M., Berger, A.M., Gaichas, S.K., Karp, M.A., Lynch, P.D., Walter, J.F., 2019. Recent advances in management strategy evaluation: introduction to the special issue "Under pressure: addressing fisheries challenges with Management Strategy Evaluation". Can. J. Fish. Aquat. Sci. 76, 1689–1696.
- Hoshino, E., Satria, F., Sadiyah, L., Yunanda, T., Suadela, P., Proctor, C., Dell, J., Davies, C., 2024. Experiences in developing empirical harvest strategies for the Indonesian tropical tuna fisheries. Ocean and Coastal Management, 253.
- Irianto, H. E., Hartati, S. T., & Sadiyah, L., 2018. Fisheries and environmental impacts in the Great Jakarta Bay Ecosystem. Indonesian Fisheries Research Journal, 23(2), 69-78.
- Kooij, M., Neefjes, K. G., Dhian, B., Timur, P. S., Yerusu, K., Baroqi, A. R., 2023. Lessons Learned from Tuna Governance Processes in Indonesia: Identifying lessons from small-scale tuna fisheries co-management processes using internal and external perspectives. MDPI.
- Leslie, A., Lugo-Mulligan, F., 2021. The Application and Evolution of eCDT Systems in Seafood Supply Chains: Addressing the Issue of Governance. A report for WWF.
- MDPI, 2023a. Indonesia Leads the Way in Sustainable Tuna Fisheries Management.
- MDPI, 2023b. Successfully Obtaining Indonesia's First Legal FAD Permit: Improving Fishing Conditions for Fishers.
- MDPI, 2023c. Regional Fisheries Co-Management Committee VI: Indonesia Boosts Blue Economy Collaboration.
- Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF), and WWF, 2011. Action Plan of Indonesian Tuna Fisheries: Better management practices for moving toward sustainable and responsible fisheries. Republic of Indonesia Ministry of Marine Affairs and Fisheries.
- MMAF and WCPFC, 2012. National Tuna Management Plan. Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Directorate General for Capture Fisheries Jakarta and Western And Central Pacific Fisheries Commission.
- MMAF Republic of Indonesia and USAID Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) Project, 2018. State of the Sea: Indonesia, Volume One: An Overview of Marine Resource Management for Small-Scale Fisheries and Critical Marine Habitats in Indonesia. Jakarta, pp. 156.
- MMAF, 2022. Indonesia National Report to the Scientific Committee of the Indian Ocean Tuna Commission, 2022. IOTC 25th Session of the Scientific Committee, 5 - 9 December 2022, Victoria, Seychelles. IOTC–2022–SC25–NR09_Rev1.
- MMAF, 2023. Harvest strategy for tropical tuna in archipelagic waters of Indonesia. Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia.
- MSC, 2024. Purse Seine. Fishing Methods and Gear Types.
- Noval, I. A., 2023. Certification of Fish Handling Skills (SKPI) and Technical Training on Good Fish Handling. Kawa Stakeholders Workshop Report. IPNLF.
- Nugroho, D., and Atmaja, S. B., 2013. Applying High Seas Fish Aggregating Devices Policies on Indonesian Purse Seiner Fleets. Indonesian Fisheries Policy Journal: Volume 5, Number 2.
- Pet, J. S., Satria, F., Sadiyah, L., IGede, W. B., Yuniarta, S., and Mous, P. J., 2022. Length-Based Assessment of Oceanic Tuna Fisheries in Indonesia Archipelagic Waters, Based on a Crew Operated Data Recording System (CODRS). Yayasan Konservasi Alam Nusantara and People and Nature Consulting, Jakarta Indonesia. Report AR_TUNAIAW_280622.
- Pew Charitable Trusts, 2019. Harvest Strategies: 21st Century Fisheries Management. Issue Brief: November 2019.
- Pew Charitable Trusts, 2020. Netting Billions 2020: A Global Tuna Valuation. Report.
- Pramoda, R., Indahyanti, B. V., Shafitri, N., Zulham, A., Koeshendrajana, S., Yuliaty, C., Kurniasari, N., Kurniawan, T., Muawanah, U., Hafsaridewi, R., Rosyidah, L., Kuncoro, H.S., 2021. Fisheries management policy in Indonesia's Exclusive Economic Zone area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 689 012001.
- Resonance Global, 2024. Walton Family Foundation – Indonesia Tuna Consortium Phase II Grant Progress Report.
- Satria, F., Sadiyah, L., Sedana, I.G.B., Yunanda, T., Suadela, P., 2020. Harvest strategies for tropical tuna in archipelagic waters of Indonesia: update. Sixteenth Regular Session of the Western and Central Pacific Fisheries Commission Scientific Meeting, Electronic Meeting, 11 – 20 August 2020. WCPFC-SC16-2020/MI-IP-24.
- Satria, F., Sadiyah, L., Suadela, P., Hernuryardin, Y., Budiarto, A., Pratiwi, C. M., Hoshino, E., Davies, C., Hillary, R., and Dell, J., 2023. Harvest Strategies for Tropical Tuna in Archipelagic Waters of Indonesia: Update. Nineteenth Regular Session of the Western and Central Pacific Fisheries Commission Scientific Meeting, 16 – 24 August 2023. WCPFC-SC19-2023/MI-IP- 10
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., Fitriana, R., 2021. Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. Marine Policy, Volume 132, 104654, ISSN 0308-597X.
- Wudianto, Widodo, A. A., Satria, F., dan Mahiswara, 2019. Study on Management of Deep Sea Fish Aggregating Devices (FADs) as Attractor for Tuna Fishing in Indonesian Waters. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia. Vol 11, No. 1, Mei 2019: 23-37.
- YII, 2023a. Study of Rumpon Management in Indonesia: Problems, Policies, and Implications. Final Report. Yayasan IPNLF Indonesia.
- YII, 2023b. Tuna FAD Dynamics: FAD (Rumpon) Community Dynamics for Tuna Fisheries. Yayasan IPNLF Indonesia.
- YII, 2023c. Kajian Strategis Recent Status Implementasi Kebijakan Rumpon Tuna di WPP 713, 714 dan 715. Focus Group Discussion Notes. Yayasan IPNLF Indonesia.



Tentang Konsorsium Tuna Indonesia

Konsorsium Tuna Indonesia menyatukan para pemangku kepentingan utama dari sektor nirlaba, swasta, dan publik untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun strategi pemanfaatan yang akan memperkuat perikanan tuna di perairan nusantara.

Juni 2024